



1090401

40401.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN BUTON
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN DAERAH**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh :

H. LA ODE MUH SJAFEI KAHAR

NIM. 014 980 947

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
KENDARI
2010**

ABSTRAK

**Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton Sebelum
Dan Setelah Pemekaran Daerah**

H. LM. Sjafei Kahar
Sjafeikhar_ut@yahoo.co.id
Universitas terbuka

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Kinerja Pembangunan Daerah, Pemekaran Daerah,

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Buton sebelum dan sesudah pemekaran daerah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Buton sebelum dan sesudah pemekaran daerah terhadap pelayanan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang yakni Ketua DPRD Kabupaten Buton (*key informan*), Asisten I Sekda Kabupaten Buton, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendapatan, Kabag Pembangunan, Kabag Tapem, Kabag Perekonomian serta Direktur RSUD. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Buton memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Buton. Hal ini dapat dilihat dari : 1) terjadi peningkatan pemerataan pendapatan di Kabupaten Buton pasca pemekaran, 2) dampak pemekaran daerah di bidang sosial budaya dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Buton yang disebabkan oleh kemampuan sektor pertanian yang sesuai dengan karakteristiknya, mampu mengakomodasi pencari kerja, 3) kebijakan pemekaran daerah telah berdampak positif terhadap daerah yang sebagian besar adalah daerah dimana selama ini program-program pemerintah diorientasikan kepada daerah pedesaan, 4) Dampak pemekaran daerah yang paling terlihat secara signifikan adalah terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Setelah pemekaran daerah, Kabupaten Buton terus mengembangkan dan menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini terjadi karena konsentrasi sumber-sumber PAD yang potensial ada di daerah-daerah pedesaan yang selama ini belum dioptimalkan.

**ABSTRACT****Evaluation of Development Performance in Buton Regency Before and After
Local Blooming**

H. LM. Sjafei Kahar
Sjafeikhar_ut@yahoo.co.id
Universitas terbuka

**Key words : Evaluation of Performance, Performance of Local Development,
Regional Blooming**

The problem of this study is what is evaluation of development performance in Buton regency before and after local blooming. The purpose of this study is to analyze the evaluation of development performance in Buton regency before and after local blooming.

This study used explanatory research approval with survey method. The informants of this study were 6 people : 1 The head of Buton regency (key informants), 1 person from the Head of Public Infrastructure Board, 1 person from the Head of Family Planning and Civil Note Board, 1 person from the Head of Education Board, 1 person from Transmigration and Labor Board and 1 person from the Head of Planology. The instrument of this study was secondary data or documentation from Planology Board Buton Regency. Data analyzed by using descriptive method with using interactive model analysis.

The result this study indicated that the regional blooming policy in Buton regency give the positive impact towards development performance. It can be seen to: 1) the improvement of income generalization, because of the access for the society to grow up, particularly in economic field . 2) the improvement of agriculture contribution towards PDRB. 3) the decreasing of unemployment – agriculture field able to accommodate the work seekers. 4) the improvement of educational field system indicators – there was no gap between the schools in city and outside of the city in terms of teacher, students, and the chance to study, 5) the decreasing of the gab in medical service – in distributing devices and medical servicers either in rural and urban area. 6) the improvement of rural developing program – particularly in building the public devices, like electric and stet. 7) the significant improvement of regency monetary system – particularly in regional source income (PAD) - in this case. Buton regency continuous to seek and develop the regional potention to increase its income. Therefore regional blooming policy bring the improvement of social welfare in Buton regency.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan berkat-Nya jualah, sehingga dapat menuangkan segala pikiran dan kemampuan untuk menyelesaikan TAPM yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah”

Dalam upaya menyusun dan menyelesaikan TAPM ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan menulis TAPM untuk meneruskan jenjang pendidikan strata dua.
2. Drs. Wawan Ruswanto, M.Si., selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ-UT Kendari. Dengan tulus hati membantu penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
3. Prof. Dr. Asmudin, M.Si., sebagai pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan TAPM ini.
4. Prof. Dr. Karsadi, M.Si., sebagai pembimbing II, dengan penuh kearifan memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan TAPM ini.
5. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dengan memberikan

demi tahapan dalam penyelesaian TAPM ini.

6. Suciati, Ph.D., selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan TAPM ini.
7. Segenap dosen di lingkungan UPBJJ-UT Kendari
8. Seluruh staf administrasi di lingkungan UPBJJ-UT Kendari.
9. Teman-teman politisi dan handai taulan yang telah banyak memberikan dukungan lahir batin untuk menata dinamika kehidupan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Buton.
10. Teristemewa isteri tercinta, anak-anakku dan segenap keluarga yang telah mencurahkan doa restu, dorongan dan motivasi dalam setiap meniti prestasi dan karir.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri semoga semua partisipasi yang diberikan dan Bapak/Ibu, Sdr/Sdri kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal disisinya. semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, bangsa dan negara, Amin.

Kendari, Oktober 2010

Penulis



Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR
NIM. 014980947



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukannya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kendari, 28 Agustus 2010
Yang Menyatakan



H. M. SJAFEI KAHAR

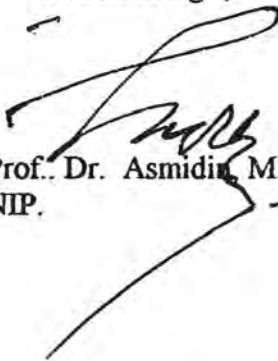


SETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)

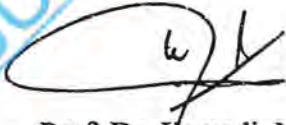
JUDUL TAPM : EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN
BUTON SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAAN
DAERAH

Penyusun TAPM : H. LA ODE MUH. SJAFEI KAHAR
NIM : 014 980947
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I,

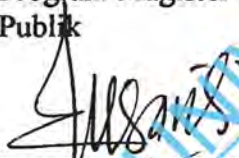

Prof. Dr. Asmidin, M.Si
NIP.

Pembimbing II,



Prof. Dr. Karsadi, M.Si
NIP. 131 943 675

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP
Program Magister Administrasi
Publik


Dra. Susanti, M.Si
NIP.

Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. Udin S Winataputra, MA.
NIP.





**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : H LA ODE MUH. SJAFEI KAHAR
NIM : 014980947
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT
ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL TAPM : EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
KABUPATEN BUTON SEBELUM
DAN SETELAH PEMEKARAN DAERAH

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas
Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Agustus 2010
Waktu : 08.00 – 10.00

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Surachman Dimiyati, Ph.D

Penguji Ahli :
Dr. Adi Suryanto, M.Si

Pembimbing I :
Prof. Dr. Asmidin, M.Si

Pembimbing II :
Prof. Dr. Karsadi, M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan.....	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Pengesahan.....	vii
Pernyataan	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Evaluasi Kinerja	9
2. Kinerja Pembangunan Daerah	13
3. Pemekaran Daerah	25
1. Kebijakan Pembangunan : Antara Efisiensi, Keadilan, dan Kemandirian Daerah	41
B. Kerangka Berpikir.....	46
C. Pertanyaan Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Desain Penelitian	48
B. Informan Penelitian.....	48
C. Instrumen Penelitian	48
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Buton.....	52
1. Letak Geografis dan Batas Daerah	52
2. Luas Daerah	52
3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	54
4. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	57
5. Struktur Umur dan Rasio Jenis Kelamin	58
6. Kondisi Tanah.....	60



n (Laut dan Sungai)	60
8. Keadaan Iklim	61
9. Potensi Sumber Daya Alam Daerah	62
10. Tataan Budaya	74
11. Pemuda dan Olah Raga	76
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah	78
1. Indikator Bidang Ekonomi	78
a. Pemerataan Pendapatan	78
b. Tingkat Pengangguran	81
2. Indikator Bidang Sosial	85
a. Pendidikan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah	85
b. Kesehatan dan Keluarga Berencana	91
3. Indikator Bidang Sarana dan Prasarana	98
a. Rasio Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik Terhadap Seluruh Rumah Tangga	98
b. Panjang Jalan	101
4. Indikator Bidang Keuangan Daerah: PAD	104
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	107
A. Simpulan	107
B. Saran-Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Proses Kinerja Pembangunan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran	47
Bagan 3.1. Teknik Analisis Data Model Interaktif.....	50

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Daerah Kecamatan di Kabupaten Buton	54
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2000-2007..	55
Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2005-2007.....	56
Tabel 4.4. Persebaran Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2006-2007.....	57
Tabel 4.5. Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007.....	59
Tabel 4.6. Perusahaan Pengolahan Tambang Aspal Buton.....	63
Tabel 4.7. Data Penyelidikan Umum dan Eksploitasi Aspal Buton Tahun 2007.....	64
Tabel 4.8. Potensi Cadangan Aspal Kabupaten Buton.....	65
Tabel 4.9. Eksplorasi Sumber Daya Mangan di Kabupaten Buton.....	65
Tabel 4.10. Produksi Perikanan Laut dan Darat Per Ton di Tiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2007.....	72
Tabel 4.11. Luas Hutan Kabupaten Buton Menurut Fungsinya Tahun 2007.....	74
Tabel 4.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2002 dan Sesudah Pemekaran Tahun 2006-2007.....	78
Tabel 4.13. Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Konstan 2000 Sebelum Pemekaran Tahun 2002 dan Sesudah Pemekaran Tahun 2006-2007.....	80
Tabel 4.14. Banyaknya Pencari Kerja di Kabupaten Buton Sebelum Pemekaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2000.....	82
Tabel 4.15. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2007.....	82



Usaha Tahun 2007	83
Tabel 4.17. Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1999-2001 (Sebelum Pemekaran Daerah)	86
Tabel 4.18. Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005-2007 (Setelah Pemekaran Daerah).	87
Tabel 4.19. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Buton Tahun 2000 (Sebelum Pemekaran).....	92
Tabel 4.20. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Buton Tahun 2007 (Sesudah Pemekaran).....	93
Tabel 4.21. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Buton Tahun 2001 Sebelum Pemekaran.....	94
Tabel 4.22. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Buton Tahun 2007 Sesudah Pemekaran.....	94
Tabel 4.23. Banyak PUS dan Realisasi Akseptor Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan Tahun 2001 Sebelum Pemekaran	96
Tabel 4.24. Banyak PUS dan Realisasi Akseptor Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Tahun 2007 Setelah Pemekaran	97
Tabel 4.25. Perusahaan, Langganan, Daya Terpasang Produksi Listrik Tenaga Listrik Terjual Serta Nilai Listrik Terjual Tahun 2007	99
Tabel 4.26. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan Sebelum (2002) dan Sesudah Pemekaran 2006-2007 (Km)	101
Tabel 4.27. Panjang Jalan Menurut Pemerintah Berwewenang dan Permukaan Dan Kondisi Serta Kelas Jalan Tahun 2007 (Km).....	103
Tabel 4.28. Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Tingkat II Buton Tahun 1997-1998.....	105
Tabel 4.29. Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Menurut Jenisnya Tahun Anggaran 2007 (Rp).....	106

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	114
Lampiran 4. Transkrip Wawancara.....	115

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi.

Kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Maka bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Kenyataan yang ada, penekanan dalam orientasi pembangunan mengalami dinamika. Ketika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada UU Nomor 5 Tahun 1974, pendulum penyelenggaraan pembangunan lebih mengutamakan sentralisasi, karena yang menjadi sasaran utama strategi pembangunan waktu itu adalah efisiensi, dan efisiensi diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi,



Paradigma *Pareto-Optimal*. Kemudian, sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah, bukan kepada efisiensi dan pertumbuhan melainkan kepada kemandirian dan keadilan.

Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut, sebagaimana diberikan “keleluasaan” oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah yang merasa diperlakukan kurang “adil” yang tercermin dari distribusi pendapatan dan tingkat pengembalian kekayaan yang dimiliki ke daerah-daerahnya, berusaha untuk mengembangkan daerah baru dan memisahkannya dari induknya.

Berkaitan dengan itu, salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan daerah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Terdapat 7 propinsi, 135 Kabupaten dan 32 kota yang terbentuk sebagai hasil pemekaran sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh DPD pada September 2007 (Effendy: 2008). Upaya pemekaran daerah dipandang

sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah yang terpecah, menjadi Kota Bau-Bau (sebagai induknya) dan Kabupaten Buton (sebagai pecahannya). Sudah barang tentu, berimplikasi pada berbagai dimensi kehidupan penyelenggaraan pembangunan, karena potensi yang dimiliki oleh kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak homogen. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan para pejabat di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, terdapat ketimpangan yang signifikan antara potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Buton dengan daerah Kota Bau-Bau. Sebagian besar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton sebelum dimekarkan berada di daerah wilayah Kota Bau-Bau. Apabila hal ini benar dan berdampak terhadap penurunan kesejahteraan Kabupaten Buton, maka pemekaran daerah yang dilakukan dapat dinilai tidak efektif (wawancara, 25 Maret 2009). Oleh karena itu, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2001 terbentuk daerah

Kota Bau-Bau terpisah dengan Kabupaten Buton. Salah satu pertimbangan pemekaran daerah dan pembentukan Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom tersebut bahwa meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Buton.

Mengingat beban tugas dan volume pekerjaan serta wilayah yang sangat luas, baik meliputi daratan dan kepulauan maka diperlukan pemekaran wilayah. Hal ini diperlukan untuk memberikan pelayanan public yang semakin baik kepada masyarakat. Sebelum pemekaran masih sangat dirasakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, seperti masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten, seperti pelayan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Atas dasar ini, pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Tata Ruang dapat melakukan langkah-langkah konkrit guna melakukan terobosan percepatan pembangunan. Seiring dengan runtuhnya orde baru dan beralih ke masa reformasi, pemerintah merasa perlu untuk memberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, hal ini dilakukan agar terciptanya (Pratikno : 2007):

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;

Dalam partisipasi politik, diharapkan adanya keterbukaan dan responsif. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan hak yang sebanding dengan kewajiban

yang harus dipenuhi masyarakat, dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengukur apakah kinerja pemerintah tersebut sudah maksimal atau belum, atau dapat dikatakan apakah pemerintah telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat atau tidak. Sedangkan untuk aspek responsif, lebih ditekankan kepada bagaimana kinerja pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat, lamban ataukah tanggap.

Disisi perekonomian, pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan perekonomian sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki, sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan dapat mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan merata.

Penjelasan diatas, digunakan oleh masyarakat lokal, salah satunya oleh masyarakat lokal Kabupaten Buton, untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom baru (Pratikno, 2007). Adanya pemekaran daerah, diharapkan daerah-daerah yang tadinya tidak dapat berkembang secara optimal karena terganjal oleh beberapa hambatan, baik faktor eksternal ataupun internal, dapat berkembang lebih baik sesuai tujuan otonomi daerah. Pada kenyataanya, pemekaran daerah di Indonesia memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai proses pemekaran itu sendiri dan eksposif dan negatif yang ditimbulkan.



Buton memiliki banyak perbedaan karakteristik geografi, demografi, historis, sosial dan budaya dari daerah lain di Sulawesi Tenggara. Kemajemukan ini menyebabkan timbulnya kesulitan untuk menyatukan kepentingan yang ada dan memiliki kecenderungan untuk menimbulkan konflik. Kesamaan karakter masyarakat yang mendiami suatu daerah, bisa lebih mendorong terciptanya partisipasi dalam mengembangkan suatu daerah. Dikarenakan dengan kesamaan karakter, masing-masing entitas masyarakat lokal dapat lebih mudah untuk saling memahami dan saling mempercayai satu sama lainnya. Sehingga potensi kesamaan masyarakat lokal dapat mendukung adanya pemekaran daerah, agar tata kelola pemerintahan daerah tersebut dapat lebih optimal.

Kabupaten Buton, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, bila dilihat dari sisi karakteristik geografi, demografi, historis, sosial dan budaya, merupakan daerah yang memiliki masyarakat lokal yang cukup homogen. Homogenitas dapat mendorong terciptanya suatu aksi bersama (Bryant : 1989), karena setiap komponen di dalamnya akan merasa terlibat dalam proses yang terjadi. Dengan berpijak dari adanya kesamaan inilah, maka Kabupaten Buton dipisahkan dari Kota Bau-Bau induknya. Proses pemisahan ini pun didukung oleh DPRD Kota Bau-Bau, dengan alasan, selain alasan sosial budaya, daerah Kabupaten Buton yang jauh dari pusat pelayanan menyebabkan masyarakat lokal yang ada di sana kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada. Sehingga usulan pemekaran tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan mendapat persetujuan



pelayanan masyarakat melalui kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Buton.

Jika dilihat dari sisi karakteristik daerah ini. Pengambilan sikap untuk melakukan pemekaran daerah, sudah cukup tepat. Melalui daerah baru ini, pemerintah khususnya dinas tata ruang dapat memaksimalkan kinerjanya. Demikian pula masyarakat yang ada dapat terlibat dalam proses pembangunan yang ada dan dapat dengan tegas, bersama-sama, menanggung resiko yang akan muncul di kemudian hari, sehingga proses pembangunan yang terjadi dapat lebih maksimal, karena dilandasi rasa kebersamaan, dan akan memberikan hasil pembangunan yang lebih maksimal pula, karena adanya keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat lokal yang ada.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Buton masih kurang optimal yang disebabkan oleh dampak kebijakan pemekaran daerah. Pemekaran daerah tersebut menuntut kinerja pembangunan untuk segera membuat perencanaan pembangunan agar tercipta kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu, bagaimana evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Buton sebelum dan sesudah pemekaran daerah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Buton sebelum dan sesudah pemekaran daerah terhadap pelayanan publik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis akademis maupun pragmatis. Kegunaan dua aspek itu dijabarkan sebagai berikut.

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu Administrasi terutama konsep efektivitas pemekaran daerah dan kinerja pembangunan. Di samping itu juga berguna sebagai salah satu acuan (*reference*) bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan studi serupa.
2. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara dan khususnya di Kabupaten Buton.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi Kinerja

Untuk mengetahui tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan oleh suatu institusi atau organisasi dibutuhkan suatu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap target atau tujuan yang direncanakan dan ditetapkan. Konsep evaluasi kinerja itu sendiri merupakan konsep dasar dari suatu institusi atau organisasi yang sangat penting. Ada beberapa konsep tentang evaluasi kinerja. Menurut Helmi mengemukakan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Lebih lanjut dikemukakan bahwa evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja (<http://shelmi.wordpress.com>, tanggal akses, 26 Oktober 2010).

Berkaitan dengan tujuan evaluasi kinerja, menurut Helmi menyatakan bahwa tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja individu dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan antara lain : (i) peningkatan kinerja, (ii) pengembangan sumber daya manusia, (iii) pemberian

gram peningkatan produktivitas, (v) program kepegawaian, (vi) menghindari perlakuan diskriminasi (<http://shelmi.wordpress.com>, tanggal akses, 26 Oktober 2010).

Untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan/pegawai diperlukan suatu penilaian kinerja yang disebut dengan *performance appraisal*. Penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, yang kadang-kadang disebut juga dengan *review* kinerja, penilaian karyawan, evaluasi kinerja, atau *rating* personalia. Semua istilah tersebut berkenaan dengan proses yang sama.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan (*job evaluation*). Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan/diberikan. Evaluasi pekerja menentukan seberapa tinggi sebuah pekerjaan berharga bagi organisasi, dan dengan demikian, pada rentang berapa gaji harus diberikan kepada pekerjaan tersebut. (Simamora : 1995)

Sehubungan dengan dilakukannya penilaian kinerja karyawan/ pegawai baik untuk organisasi pemerintah maupun swasta, diperlukan suatu persyaratan sistem penilaian kinerja yang efektif. Adapun persyaratan tersebut adalah :

- a. relevansi (*relevance*);
- b. sensitivitas (*sensitivity*);
- c. keandalan (*reliability*);
- d. kemampuserimaan (*acceptability*);

Relevansi (*relevance*) menyiratkan bahwa terdapat :

- a. kaitan yang jelas antara standar kinerja untuk suatu pekerjaan tertentu dan tujuan organisasi;
- b. kaitan yang jelas antara elemen-elemen kerja yang kritis yang diidentifikasi melalui suatu analisis pekerjaan dan dimensi-dimensi yang akan dinilai pada formulir penilaian.

Sensitivitas (*sensitivity*) menyatakan bahwa suatu sistem penilaian kinerja mampu membedakan antara pelaksana yang efektif dengan tidak efektif. Jika tidak dan pelaksana terbaik di nilai secara tidak berbeda dengan pelaksana terburuk, maka sistem penilaian tidak dapat digunakan untuk tujuan administratif apapun, sistem ini akan mengurangi motivasi bawahan.

Keandalan (*reliability*) berarti penilaian yang bebas dari kelemahan-kelemahan signifikan. Penilaian haruslah berisi subyektivitas minimal yang menyebabkan distorsi. Ukuran langsung keluaran (*output*) sangat dapat diandalkan, tetapi ukuran seperti itu tidak selalu tersedia atau dapat diterapkan. Untuk memberikan dapat yang dapat diandalkan setiap penilai mestilah memiliki kesempatan yang memadai untuk mengamati apa yang telah dikerjakan oleh karyawan dan kondisi dimana dia bekerja.

Kemampuserimaan (*acceptability*) adalah persyaratan yang paling penting dari semuanya, karena benar bahwa program sumber daya manusia haruslah

dari orang-orang yang akan menggunakannya, atau jika tidak keahlian sumber daya manusia akan digunakan untuk merintanginya mereka.

Kepraktisan (*practicality*) menyatakan bahwa instrumen penilaian mudah dipahami dan digunakan oleh manajer dan karyawan. Dalam pemerintahan, penilaian kinerja ini disebut juga dengan pengukuran kinerja. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukuman (*reward/punishment*) akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. (Lembaga Administrasi Negara : 2000)

Adapun pendekatan ganda terhadap tujuan penilaian kinerja menurut Helmi sebagai berikut. *Pertama*, tujuan evaluasi, yakni hasil-hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar bagi evaluasi reguler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi yang meliputi : (i) telaah gaji, yaitu keputusan-keputusan kompensasi yang mencakup *merit-pay*, bonus, dan kenaikan gaji lainnya merupakan salah satu tujuan utama penilaian kinerja, (ii) kesempatan promosi, yaitu keputusan-keputusan penyusunan pegawai (*staffing*) yang berkenaan dengan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian karyawan merupakan tujuan kedua dari penilaian kinerja. Kedua, tujuan pengembangan, yakni informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja

untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota organisasi, yang meliputi : (i) mengukuhkan dan menopang prestasi kerja, (ii) meningkatkan prestasi kerja, (iii) menentukan tujuan-tujuan progresi karir, (iv) menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan (<http://shelmi.wordpress.com>, tanggal akses, 26 Oktober 2010).

2. Kinerja Pembangunan Daerah

Kinerja atau disebut juga dengan prestasi kerja adalah : "Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya". (Siswanto, 1989: 195).

Kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, berpenampilan atau berhasil karya. Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang bermutu dimensional, sehingga cara mengukurnya bervariasi bergantung pada banyak faktor. Indikator kinerja organisasi merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja juga berguna untuk meyakinkan komponen organisasi bahwa kinerja komponen organisasi setiap hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan (Muljadi : 2006).

Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan berikut ini : "Kinerja karyawan (*employee performance*) adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan". (Simamora : 1995)



ra (2001) menggunakan istilah kinerja sama dengan prestasi kerja (*actual performance*). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah "hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya."

Lebih lanjut As'ad (2001) menyatakan bahwa: Kinerja karyawan merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Amstrong dalam Sofian (1998) penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk melaporkan prestasi kerja dan kemampuan dalam suatu periode waktu yang lebih menyeluruh, yang dapat digunakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan.

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksanaan tugas, telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pengukuran kinerja penting sebagai alat manajemen untuk :

- a. memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja;
- b. memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati;

- mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja;
- d. memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
 - e. menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi;
 - f. mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
 - g. membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
 - h. memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif;
 - i. menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan;
 - j. mengungkapkan permasalahan yang terjadi. (Lembaga Administrasi Negara : 2000)

Berkaitan dengan kinerja karyawan/pegawai dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja, yaitu :

- a. karakteristik situasi;
- b. deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja pekerjaan;
- c. tujuan-tujuan penilaian kinerja;
- d. sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. (Simamora : 1995)

Karakteristik situasi, dalam keadaan ini situasi yang dimaksud adalah lingkungan, organisasi dan sumber daya yang dimiliki. Lingkungan menempatkan tuntutan-tuntutan organisasi dan para karyawannya terhadap produktivitas. Struktur



...an siapa yang memiliki tanggung jawab untuk penilaian.

Sumber daya yang dimiliki organisasi mempengaruhi frekuensi, kelengkapan dan kecanggihannya.

Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja pekerjaan. Dalam hal ini analisis pekerjaan haruslah menyertai analisis situasional dan bertindak sebagai hati penjurur terhadap penilaian kinerja dengan membentuk kriteria terhadap mana individu harus dievaluasi. Penilaian kinerja mestilah berhubungan secara langsung dengan aktivitas-aktivitas yang ada dalam deskripsi pekerjaan. Spesialis sumber daya manusia ataupun para manajer dapat menggunakan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja untuk merancang format penilaian kinerja.

Tujuan-tujuan penilaian kinerja. Tujuan pokok sistem penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin akurat dan valid informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi nilainya terhadap organisasi. Sedangkan tujuan khususnya adalah melakukan evaluasi (*evaluation*), merupakan basis bagi evaluasi regular terhadap kinerja anggota-anggota organisasi dan pengembangan (*development*) dengan sistem penilaian kinerja akan memudahkan dilakukannya pengembangan pribadi anggota organisasi.

Sikap para karyawan dan manajer terhadap organisasi. Dalam kondisi ini dilakukan dengan mengkombinasikan baik aspek evaluasi maupun aspek pengembangan. Dalam kaitannya dengan proses penilaian kinerja para karyawan/



Analisis jabatan mempunyai peranan yang penting. Melalui analisis jabatan akan diperoleh informasi dan fakta-fakta yang lengkap mengenai setiap karyawan/pegawai, kedudukan dan pekerjaan atau tugasnya didalam suatu organisasi. Di samping itu, analisis jabatan juga mempunyai manfaat lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, antara lain :

- a. Pemberian bimbingan kepada para karyawan
- b. Pengenaan sanksi atau tindakan-tindakan disiplin terhadap karyawan secara obyektif, apabila diperlukan.
- c. Penentuan tingkat upah dan gaji serta penghasilan lainnya, serta insentif-insentif.
- d. Promosi, baik promosi kepangkatan maupun promosi jabatan
- e. Pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Pemindahan atau mutasi karyawan, baik di dalam unit kerjanya maupun antara unit kerja dalam organisasinya yang bersangkutan. (Notoatmodjo : 1998)

Dalam organisasi yang sudah maju, fungsi analisis jabatan ini diserahkan kepada suatu unit tersendiri. Unit ini seyogyanya terdiri dari orang-orang yang memang mempunyai kemampuan khusus. Unit kerja ini mempunyai peran yang sangat menentukan, karena hasil analisis jabatan yang aplikasinya sangat penting dan luas, bukan saja pada penilaian prestasi kerja, melainkan sebagai masukan dalam pengembangan sumber daya manusia secara umum.

Menurut Handoko (1999) guna mengetahui kinerja pegawai yang diperlukan kegiatan-kegiatan khusus, yaitu: pertama, identifikasi dimensi kerja yang mencakup semua unsur yang akan dievaluasi dalam pekerjaan masing-masing karyawan dalam suatu organisasi, dan kedua, penetapan standar kerja, penilaian prestasi kerja



... (aisal) adalah suatu proses melalui organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawainya.

Selanjutnya (Dharma : 1992) mengemukakan bahwa standar dalam penilaian prestasi kerja mencakup: .

1. kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan;
2. kualitas/mutu yang dihasilkan;
3. ketepatan waktu kerja/sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan *output* dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah *output* yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif *output* mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pengukuran ketepatan waktu, merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu dari suatu kejadian.

Menurut Umar (1995) variabel kinerja terdiri atas komponen-komponen:

- a. mutu pekerjaan;
- b. kejujuran karyawan;
- c. inisiatif;
- d. kehadiran;
- e. sikap;
- f. kerja sama;
- g. keandalan;
- h. pengetahuan tentang pekerjaan;

j. pemanfaatan waktu.

Menurut Mangkunegara (2001) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut .

- 1) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan karyawan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- 2) Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila karyawan menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi
- 3) Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak berbuat kesalahan terhadap pekerjaan merupakan tuntutan bagi setiap karyawan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka diperlukan adanya suatu ukuran atau standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah prestasi kerja telah sesuai dengan keinginan yang diharapkan, sekaligus untuk melihat besarnya penyimpangan yang terjadi dengan membandingkan antara pekerja secara aktual dengan hasil standarnya

Bagi masyarakat di daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jelas merupakan prospek yang menjanjikan adanya perubahan dan perbaikan kinerja kebijakannya termasuk kinerja kebijakan ekonomi makronya. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Pemerintah Daerah sekarang ini telah diberikan keleluasaan dalam perumusan dan penetapan kebijakan daerah, dan untuk



kan tersebut telah dialokasikan dana perimbangan dari kas negara.

Otonomi Daerah dalam bidang fiskal sebagaimana tertuang dalam kedua undang-undang tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada dasarnya merupakan instrumen yang paling memungkinkan bagi daerah, terutama daerah kabupaten/kota, untuk mampu berperan dalam memberdayakan ekonomi daerahnya. Akan tetapi kebijakan tersebut bukan tidak ada bahayanya, terutama jika implementasi kebijakan tersebut tidak dilengkapi dengan instrumen pengendalian yang memadai oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Pengeluaran (*expenditure atau spending*) pemerintah daerah yang tidak terkendali yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan ataupun pinjaman daerah (dalam negeri maupun luar negeri) sehingga mengakibatkan defisit yang berlebihan, akan berdampak kepada kondisi stabilitas makro ekonomi.

Mengingat hal itu, desentralisasi dalam bidang keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu saja harus disertai dengan akuntabilitas Pemerintah Daerah, baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Bentuk akuntabilitas yang harus menjadi komitmen Pemerintah Daerah bukan semata-mata ditinjau dari berapa banyak program dan jangkauan program yang dapat dilaksanakan.



kinerja tersebut harus dapat diukur terutama dari kemanfaatannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, antara lain adalah tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat daerah. Dalam pengertian ini, pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sedemikian rupa dengan berbagai program pembangunan yang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di daerah. Pembiayaan pembangunan harus betul-betul diarahkan kepada sektor-sektor yang secara langsung mampu mendorong terciptanya kegiatan produktif masyarakat, penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang baru; dengan tetap memperhatikan sektor-sektor lainnya yang secara langsung dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sumber-sumber produksi dan sebagainya.

Kita sadari bahwa dalam kondisi dewasa ini, perekonomian daerah yang pada umumnya masih mengandalkan kepada sektor pertanian dirasakan sudah kurang mampu menghasilkan tingkat produktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi ini berbeda dengan struktur perekonomian nasional yang telah cenderung di dominasi oleh produktivitas sektor sekunder, yaitu sektor perindustrian bersama-sama sektor jasa-jasa. Memang dalam periode krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997/98 yang lalu, perekonomian daerah cenderung *survive* justru karena sektor pertanian tidak terkena dampaknya. Akan tetapi dalam kondisi normal hal itu tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi



...si oleh sektor primer, pada akhirnya cenderung akan tertinggal dan terus merosot.

Akibatnya, kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat juga akan semakin merosot pula, karena daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Akibat lanjutannya, Pemerintah Daerah juga akan menemukan kesulitan dalam menarik dana dari masyarakat melalui sistem perpajakan daerah. Jika ini yang terjadi, maka perekonomian daerah kembali akan sangat bergantung kepada kekuatan-kekuatan ekonomi eksternal, baik yang berasal dari daerah lain yang bertetangga, bantuan-bantuan pemerintah atau propinsi, bahkan kekuatan perekonomian global yang masuk ke daerah yang bersangkutan.

Dengan semakin luasnya otonomi daerah yang dapat diselenggarakan di daerah, maka Pemerintah Daerah harus memiliki inisiatif dan kreativitas yang lebih baik lagi dalam memberikan insentif bagi pertumbuhan kemandirian ekonomi daerah. Namun demikian, hendaknya pemerintah Daerah tidak terjebak kepada opsi kebijakan yang cenderung terlalu bersifat redistributif, dengan mengobral subsidi ataupun bantuan-bantuan sosial ekonomi yang tidak mendidik masyarakat untuk produktif dan memiliki daya saing. Sebaliknya, masyarakat juga sebaiknya jangan selalu mengharapkan bahwa Pemerintah Daerah akan datang memberikan paket-paket bantuan seperti itu, karena pada kenyataannya kemampuan daerah sangat terbatas. Jika diperhatikan, kontribusi pengeluaran pemerintah Daerah dalam PDRB secara umum hanyalah berkisar antara 10% hingga 20% dari total PDRB daerah.

but di atas menunjukkan bahwa peranan ekonomi pemerintah sendiri dalam perekonomian daerah adalah relatif rendah. Namun yang terpenting adalah seberapa jauh program-program pembelanjaan anggaran daerah dapat memberikan efek penggandaan (*multiplier effect*) yang cukup signifikan bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat. Oleh karena, itu strategi dasar yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan otonomi yang berlaku, tampaknya adalah menciptakan efisiensi ekonomis dan efektivitas program-program pembelanjaan daerah.

Dalam pembebanan kewenangan dan tanggung jawab pada berbagai tingkatan pemerintahan, Bryant dan White (1989: 67) menyarankan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, suatu proyek atau program hendaknya diserahkan pada organisasi apapun yang memiliki "insentif" untuk melaksanakannya. *Kedua*, "lingkungan politis" suatu organisasi harus menunjang pelaksanaan proyek atau program tersebut. *Ketiga*, bahwasannya kebanyakan proyek melibatkan beberapa organisasi, sehingga hubungan antar organisasi dan cara-cara organisasi berinteraksi menjadi penting untuk diperhatikan. *Keempat*, harus dibuat pilihan-pilihan dengan mempertimbangkan bukan hanya kapasitas yang telah dimiliki organisasi, melainkan juga sehubungan dengan pengembangan kemampuan kelembagaan organisasi-organisasi di daerah itu sendiri.

Cara lain untuk mempertimbangkan kapan suatu aktivitas pembangunan dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat nasional dan kapan dilakukan oleh pemerintahan regional tergantung kepada tiga hal yaitu: *Pertama*, banyaknya



perlu. Sejahtera bahwa kebijakan itu didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang baik serta pada kepastian tentang prosedur serta hasil akhir, maka dapat dijalankan pengendalian dan kontrol sentral yang lebih besar. Tetapi kalau suatu kebijakan dioperasikan dalam konteks yang tidak menyediakan informasi yang cukup lengkap, preferensi dan kebutuhan-kebutuhan konsumennya kurang jelas, dan tugas-tugas administrasinya kabur, maka sebaiknya dilaksanakan di tingkat regional.

Kedua, cara pemasokan komoditas yang diperlukan oleh masyarakat konsumen. Ada barang-barang yang harus diproduksi pada skala besar dan memerlukan modal yang besar (*capital intensive*), namun ada pula barang atau jasa yang pemasokannya melibatkan kontak antar individu, misalnya pelayanan kesehatan. Untuk komoditas jenis pertama lebih baik dilakukan atau dipasok pada tingkat nasional. Sementara itu, untuk jenis yang kedua lebih baik dipasok pada tingkat regional atau lokal, karena lebih sulit dipantau, bervariasi sesuai dengan lokasinya, dan sangat bergantung kepada pandangan masyarakat. Semakin banyak kontak tatap muka yang dituntut, akan makin sukarlah mengelola suatu organisasi besar karena kesulitan mengawasi mutu hubungan antar pribadi dan sukarnya mengukur hasil.

Ketiga, peraturan dan daya tanggap. Peraturan dan pengaturan berarti memberlakukan standar-standar yang adil. Dan keadilan sering tercapai dengan baik bila pengaturan ditangani di tingkat nasional. Namun, bila daya tanggap menjadi perhatian utama, mungkin bermanfaat jika dilakukan desentralisasi tugas-tugas,

tugas lokal dapat menyesuaikan programnya dengan kondisi-kondisi lokal.

Sementara itu Leftwich, *et al.* (1980) menyatakan bahwa penentuan pihak yang berwenang atas pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan *net benefit* yang paling maksimal yang dapat diperoleh dari pembangunan tersebut, yaitu pada saat *marginal benefit* sama dengan *marginal cost* dari pengeluaran untuk barang atau jasa publik yang harus disediakan. Prasyarat ini dikenal dengan *equimarginal principle*. Pengeluaran pemerintah harus meningkat ketika manfaat dari rupiah terakhir yang dikeluarkan lebih besar dari biayanya. Sementara itu, pengeluaran pemerintah harus dikurangi ketika manfaat yang didapatkan dari rupiah terakhir yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan biayanya.

Tingkatan pemerintahan yang mempunyai *equimarginal level* yang lebih rendahlah yang semestinya berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan suatu jenis barang atau jasa publik. Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut, maka dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah harus benar-benar diarahkan pada optimalisasi net benefit yang akan diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

3. Pemekaran Daerah

Istilah pemekaran berasal dari kata "mekar" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak".

pemekaran artinya membentuk menjadi banyak atau tumbuh menjadi satu bagian yang telah ada sebelumnya atau induknya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 menyebutkan tujuan pembentukan dan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. percepatan pertumbuhan kehidupan dan demokrasi;
- c. percepatan pelexaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. meningkatkan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.

Menurut Rasyid Thaha (1996) mengemukakan bahwa pemekaran umumnya disebabkan oleh beberapa hal.

1. Alasan administrasi

a. Jumlah penduduk

Penduduk adalah orang yang menempati daerah tertentu dalam waktu yang lama. Sebelum terjadi pemekaran, kabupaten Buton berdasarkan registrasi pada tahun 2000 berkisar 450.448 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 1,68%. Tingkat persebaran penduduk tidak merata mengakibatkan pula tingkat kepadatan penduduk pada stiap kecamatan sangat bervariasi. Angka kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Wolio dan Betoambari masing-masing 1.188 jiwa/Km² dan 1.087 jiwa/Km², sedangkan kepadatan penduduk yang terendah adalah



...umbia 27 jiwa/Km², Kabaena 32 jiwa/Km² dan kecamatan Kabaena Timur 36 jiwa/Km².

b. Daerah Terlampau Luas

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah yaitu keluasan daerah yang diukur dari garis pantai sampai dengan batas daratan yang ditentukan. Sehubungan dengan hal ini sebelum pemekaran luas daerah kabupaten Buton yaitu meliputi Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kota Bau-Bau dewasa ini. Atas dasar ini, maka mempengaruhi penyebaran penduduk dengan secara otomatis mempengaruhi proses pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar karena harus melintasi pulau menuju pusat-pusat pelayanan.

Berdasarkan realitas yang ada, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2004 pada pasal 3 huruf a, Kabupaten Buton sudah sewajarnya untuk dimekarkan guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, melalui pemekaran daerah akan terbagi dan sumber-sumber pendapatan pada setiap daerah kabupaten dapat dikelola secara optimal.

c. Dimensi Sosial Budaya

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan sosial budaya pemerintah telah mengupayakan berbagai usaha guna tercapainya

rakyat. Usaha tersebut meliputi kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana dan ketertiban serta bidang sosial lainnya.

1) Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan dititik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan perluasan wajib belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah setiap tahunnya meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dapat memperoleh kesempatan pendidikan.

2) Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pembangunan kesehatan dititikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat demikian pula program keluarga berencana nasional dimaksudkan untuk menciptakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

3) Keamanan dan ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan yang selalu didambakan masyarakat baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat dewasa ini mengupayakan berbagai usaha guna terciptanya kehidupan yang aman dan tertib.

Adanya hal tersebut maka dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial budaya pada dasarnya merupakan gambaran secara umum dalam kehidupan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pelayanan di bidang ini perlu ditingkatkan untuk dijadikan indikator perkembangan pembangunan dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Alasan Politik

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 156 Tahun 2004, Bupati/Walikota harus melimpahkan kewenangan-kewenangan sebagai berikut.

a. Bidang pemerintahan

- 1) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan
- 3) Pelaksanaan koordinasi serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas di daerah kerjanya).
- 4) Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- 5) Pengordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintah daerah kerjanya.
- 6) Fasilitas penyelenggara pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.
- 7). Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan, dan anggota DPR di daerah kerjanya.
- 8) Melakukan penilaian atas laporan pertanggung jawaban kepala desa.
- 9) Fasilitas penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa.



desa/ kelurahan

- 11) Fasilitas penyusunan peraturan desa.
- 12) Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan.
- 13) Pelaksanaan kegiatan administrasi.
- 14) Pelaksanaan inventaris aset-aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di daerah kerjanya.
- 15) Penegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di daerah kerjanya.
- 16) Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu.
- 17) Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 1) Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di daerah kerjanya.
- 2) Fasilitas pengembangan perekonomian desa/kelurahan.
- 3) Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 4) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di daerah kerjanya.
- 5) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
- 6) Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.

cegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

8) Pengordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

c. Bidang pendidikan

- 1) Fasilitas penyelenggara taman kanak-kanan dan pendidikan dasar.
- 2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- 3) Pembinaan dan pengawasan program kesehatan masyarakat.
- 4) Fasilitas penyelenggara sarana pendidikan, pelayanan kesehatan.
- 5) Penyelenggaraan keluarga berencana.

d. Bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat

- 1) Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan.
- 2) Kegiatan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- 4) Pembinaan lembaga adaptasi dan suku terasing.
- 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi.
- 6) Penanggulangan masalah sosial.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemekaran daerah lekat dengan paradigma peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kondisi



dan budaya masyarakat lokal yang ada dan hubungannya dengan pemerintahan nasional pada konteks yang lebih luas. Akan tetapi akan sangat sulit untuk memposisikan apakah dampak yang dirasakan positif atau negatif, karena pemekaran di setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri dan selalu memiliki dua sisi yang berbeda dalam suatu dimensi yang sama (Pratikno : 2007). Oleh karena itu, kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Buton memang membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan masyarakatnya, namun tidak dapat dilepaskan dari dampak negatif yang juga mungkin, dapat terjadi. dampak negatif di sini akan lebih diarahkan sebagai masukan untuk menunjang proses dan hasil yang telah ada agar dapat berjalan dengan lebih maksimal.

a. Dampak Pemekaran Pada Sosiokultural

Setiap daerah, memiliki keunikan budaya masing-masing. Identitas budaya yang berbeda ini akan berdampak pada perbedaan karakteristik dan tingkah laku. Masyarakat homogen cenderung dapat lebih kuat hubungan antar entitasnya dibandingkan masyarakat heterogen. Oleh karena itu, dalam masyarakat heterogen, hubungan yang ada memang bisa dikatakan kuat, akan tetapi tetap rentan terhadap konflik jika dibandingkan dengan masyarakat yang lebih homogen. Perbedaan sifat dan karakteristik akan menyebabkan konflik, yaitu yang terjadi antara budaya mayoritas dengan budaya minoritas. Solusi yang terjadi bisa saja kelompok minoritas diterima ataupun ditolak oleh kelompok mayoritas atau kelompok minoritas menolak untuk bergabung dengan kelompok mayoritas. Jika dilihat dari fenomena masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mayoritas terdiri dari

ngan adat isitiadatnya, menginginkan adanya satu kesatuan daerah yang dapat menampung aktivitas mereka. Kemudian ditanggapi dengan adanya pengakuan secara legal dari pemerintah nasional, dengan pembentukan daerah baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif pada kepuasan masyarakat lokal terhadap kinerja pemerintahan nasional, sehingga muncul dukungan terhadap keberadaan pemerintah nasional. Pengakuan juga dapat mempengaruhi konflik yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat lokal, sehingga dapat diminimalisir (Pratikno : 2007).

Pada masyarakat Indonesia yang terjadi adalah, kelompok minoritas dapat diterima dengan baik oleh kelompok mayoritas, sehingga konflik budaya yang, mungkin, terjadi bisa diminimalisir. Pemekaran daerah dipandang sebagai salah satu alternatif seluruh masyarakat lokal untuk dapat berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraan di daerah mereka. hal tersebut menunjukkan keterikatan dalam suatu kelompok yang cenderung sama memberikan konsekuensi setiap entitas yang ada dapat lebih mudah bekerja sama, baik hal tersebut terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang ada (Bryant : 1989).

Bila dilihat dari aspek historis, beberapa daerah di tanah air merupakan daerah yang menjadi daerah administratif jauh sebelum munculnya kekuasaan oleh negara. Hal ini dapat juga mendorong terciptanya suatu daerah otonom. Masyarakat lokal suatu daerah, akan lebih merasa sebagai bagaian dari daerahnya atau asalnya dibandingkan dia merasa dirinya sebagai bagian dari sebuah daerah yang terbentuknya belakangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, historis suatu

Tempengaruhi keinginan lebih kuat untuk menciptakan suatu daerah pemerintahan sendiri.

Namun hal di atas, harus dapat diperhatikan dengan cermat untuk ke depannya, karena adanya kesamaan kesukuan dapat menimbulkan rasa cinta yang berlebihan pada daerah asal mereka. Hal ini dapat mengancam integritas dan hubungan dengan daerah lain yang berada di sekitar daerah mereka. Karena interaksi akan tetap terjadi di antara daerah yang berbeda, maka dibutuhkan pola penanganan yang lebih baik pula. Contohnya: Dengan melecehkan suku atau daerah lain, dapat menimbulkan konflik dan perpecahan horizontal di antara masyarakat. perbedaan persepsi mengenai pengolahan sumber daya alam ataupun penetapan batas administrasi, dapat menyebabkan konflik antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Pratikno: 2007). Oleh karena itulah diperlukan sikap *governmentality* yang baik dari pemerintah daerah.

b. Dampak Pemekaran Pada Pelayanan Publik

Pemekaran daerah, konsep pemerintahan yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, karena mampu meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang lebih optimal, dikarenakan pemerintah dapat lebih responsif dengan cakupan daerah pelayanan yang tidak terlampau luas. Kemudahan-kemudahan akan tercipta bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik, seperti listrik, air bersih dan persampahan. Di samping itu pemerintah akan lebih mudah dalam pengelolaan

arena mereka berada dekat dengan konsumen yang harus dilayani. Kemudian partisipasi masyarakat yang akan lebih baik karena adanya kedekatan antara pemerintah, sebagai perumus kebijakan, dengan masyarakat, sebagai tujuan diciptakannya kebijakan. Kedekatan ini terjadi, karena luasan daerah pemerintahan yang tidak terlampau luas, sehingga memudahkan pengawasan terhadap proses perencanaan yang dilakukan, baik oleh pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat lokal yang ada. Namun ketika kapasitas pemerintahannya belum mencukupi untuk mengerti kebutuhan di bawah, maka yang muncul adalah masalah, karena tidak akan terjadi koordinasi dan kerjasama dalam melakukan tata kelola pemerintahan. Aspek *governmentality* akan sangat mempengaruhi tingkat kinerja suatu pemerintahan (Pratikno : 2007), karena melalui proses inilah akan dapat diketahui kearah manakah pembangunan akan dibawa.

Pemerintahan kabupaten/kota dengan kapasitas aparatur yang ada dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menimbulkan beberapa indikasi mengenai kapasitas pemerintah. Indikasi yang pertama, bahwa pemerintah Kabupaten/kota telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses kinerja pemerintah, sehingga ketika ada sesuatu hal yang dianggap menyimpang, masyarakat akan segera mengetahuinya dan memberikan pendapatnya tanpa takut adanya intervensi. Indikasi yang kedua, pola tata kelola pemerintahan yang belum cukup baik, menyebabkan adanya oknum pemerintah daerah yang sengaja mengambil keuntungan sebesar-besarnya melalui pemerintahan baru ini. Dengan bantuan pendanaan dari pemerintah per tahun selama pada tahun pertama dan kedua,

akan sangat mungkin ada pihak-pihak yang mencoba menarik keuntungan dari sini. Atau ada indikasi permainan politik, dikarenakan adanya konflik di antara elit penguasa, menyebabkan saling tudingnya antar elit kuasa. Mencari-cari kesalahan di kubu lawan.

Hal ini dapat berdampak positif, jika kemudian timbul persaingan untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi pendukung di antara elit kuasa atau hanya akan berdampak buruk dengan terjebaknya elit kuasa dalam permainan politik yang saling menjatuhkan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak yang bertikai namun juga akan merugikan masyarakat, karena fungsi pelayanan yang harusnya diberikan kepada masyarakat, tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, dalam melaksanakan tata kelola pemerintah, terutama dengan adanya karakteristik yang cukup homogen di masyarakatnya, sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan partisipatif sehingga perbedaan interpretasi dan konflik kepentingan dapat diperkecil (Laporan Penelitian UNPAD : 2003).

Namun kondisi akan berdampak negatif jika dilihat dari sudut pemerintahan nasional. Dengan adanya pemerintahan baru, berarti dibutuhkan infrastruktur baru yang harus dapat menunjang kinerja pemerintahan daerah dan dibutuhkannya pegawai-pegawai yang berkapasitas untuk mulai melaksanakan pelayanan publik. Hal ini berarti bertambahnya anggaran belanja negara untuk pegawai dan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk bidang lainnya, tapi hal ini dapat terjadi jika dalam kondisi anggaran belanja negara tetap dan tidak mengalami

penurunan atau penambahan pemasukan. Akan tetapi bila dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah, pemekaran akan tetap menguntungkan, karena penerimaan DAU (Pratikno : 2007).

c. Dampak Pemekaran Bagi Pembangunan Ekonomi

Bagi peningkatan perekonomian, pemekaran daerah dapat berdampak positif jika adanya kebijakan baru yang dapat diambil oleh pemerintah daerah berhasil meningkatkan aktivitas perekonomian yang terjadi di daerah tersebut. Dengan status sebagai kabupaten baru, daerah akan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik daerah. Seperti halnya pengembangan infrastruktur untuk menunjang perekonomian daerah. Adanya pembangunan infrastruktur, jika dapat bersinergi dengan kebijakan ekonomi yang ada, malah akan lebih cepat mendorong aktivitas perekonomian, seperti yang terjadi di Gorontalo.

Keikutsertaan masyarakat juga akan lebih besar dalam proses pembangunan, karena masyarakat sebagai ujung tombak penggerak aktivitas perekonomian yang ada. Pemerintah dituntut untuk kritis dalam menghadapi potensi seperti ini. Namun disisi lain, kondisi ini menyebabkan pengeluaran pemerintah nasional akan semakin besar. Akan tetapi pengeluaran untuk belanja ini dapat diminimalisir jika pemerintah daerah mampu menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan. Mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan ekonomi lokal, dengan menyerahkan seluruh proses perencanaan kepada masyarakat, sedangkan pemerintah dengan bantuan tenaga ahli hanya sebagai fasilitator, yang berfungsi untuk

memenuhi kebutuhan yang diminta. Sehingga dalam proses ini, kebutuhan masyarakat akan tercapai dengan maksimal, di samping itu pemerintah hanya mengeluarkan dana yang tidak terlampau besar dan dalam implementasi dan pengelolannya dibantu oleh masyarakat. Hal ini, di samping menciptakan kepercayaan dan hubungan yang lebih erat pemerintah daerah dengan masyarakat lokal, juga dapat memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan dengan kabupaten Induk. Dari sisi investasi, hal ini juga dapat menjadi investasi jangka panjang dan dapat menjaga stabilitas perekonomian yang ada.

Sektor andalan bagi daerah pemekaran baru yang menonjol baik pertanian maupun perkebunan, dapat digunakan sebagai aktivitas ekonomi utama. Dengan mendirikan infrastruktur yang tepat, seperti jalan, maka akan memberikan kesempatan interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat lokal tetangga, yang kemudian akan memberikan pengaruh pada semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Pemerintah sedari awal, harus dapat memberikan pengarahannya pengembangan perekonomian, untuk mengantisipasi kondisi yang akan datang. Masyarakat juga bisa diberdayakan dengan membuka forum-forum warga, dalam rangka menangkap aspirasi masyarakat lokal untuk kemudian dimasukkan dalam kebijakan pembangunan perekonomian.

Sisi pendidikan juga dapat menjadi upaya vital untuk pengembangan perekonomian, seperti yang terjadi di Gorontalo. Pemerintah daerah memasukkan pembelajaran mengenai potensi daerah ke dalam kurikulum sekolah. Di Kabupaten lain yang dimekarkan, pemerintah dapat menambahkan mengenai inovasi baru

dalam kurikulum pendidikannya sesuai dengan potensi yang ada. Pada awalnya hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya potensi tersebut bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kemudian yang harus dilakukan adalah memberikan kebebasan siswa untuk mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari. Keberlanjutan yang ada, tidak hanya bisa diukur dari keseluruhan siswa menjadi sarjana pertanian. Namun lebih kepada pemberian posisi kepada masyarakat lokal mengenai apa yang harus mereka lakukan, mungkin saja ada yang berminat mengembangkan alat produksi pertanian yang lebih efisien, sehingga produksi padi dapat lebih maksimal, atau alat perontok kopi. Tapi mungkin saja di sisi lain ada yang ingin jadi pelukis, dengan memo'ret panorama aktivitas pertanian dan perkebunan, mereka dapat digunakan sebagai media promosi untuk menarik wisatawan. Akan tetapi memang dalam melakukan hal ini, dibutuhkan konsistensi pemerintah, karena proses yang dilalui akan sangat panjang.

d. Dampak Pemekaran Pada Pertahanan

Keamanan dan Integrasi Nasional dalam sisi Hankam dan integrasi nasional, pemekaran daerah dapat menunjukkan kepada masyarakat yang terpencil, bahwa bangsa Indonesia tidak hanya sebatas tentara, yang mengendalikan kondisi agar kondusif, melainkan dapat menunjukkan bahwa ada elemen pemerintahan lain yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Pratikno : 2007). Dengan adanya hal ini, maka kehadiran pemerintah nasional di daerah dapat diwakili melalui pemerintah daerah. Sekaligus juga mengajarkan, rasa cinta kepada tanah air dan mengurangi konflik yang dapat membawa bangsa ini pada perepecahan.

Daerah kabupaten/kota yang memiliki topografi yang berbukit dan pulau-pulau yang tersebar, menyebabkan pola persebaran aktivitas yang menyebar. Hal ini akan menyulitkan pegawai pemerintahan, untuk mengakses dan memberikan pelayanan. Agar masyarakat dapat merasakan pelayanan, tanpa merasa dianaktirikan maka konsep pemekaran daerah merupakan suatu langkah nyata untuk meredakan kekecewaan masyarakat lokal terhadap pemerintahan dan memberikan mereka hak pelayanan yang sama dengan masyarakat lokal di daerah lainnya. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya pemerintahan yang terbentuk, hal ini juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan dana untuk memberkahi pelayanan yang maksimal. Selain itu bila dilihat dari sisi politik, hal ini akan memberikan efek yang sangat besar jika pada awal pembentukannya tidak dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dari adanya beberapa daerah pemekaran baru yang minta dimekarkan lagi, karena tidak puas dengan hasil yang ada. Kesamaan visi pembangunan, merupakan modal kuat untuk terus melanjutkan pembangunan daerah.

Namun, kabupaten/kota yang memiliki mayoritas penduduk homogen, mungkin, akan lebih mudah dalam pengaturannya. Karena masyarakat budaya, akan lebih mudah menerima keputusan bersama, dibandingkan dengan masyarakat modern. Akan tetapi yang menjadi modal terpenting adalah dengan tetap memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk mengeluarkan pendapat, hal ini bertujuan agar tidak muncul marginalisasi dan kesenjangan sosial antar penduduk, karena dapat menciptakan konflik yang lebih tinggi.

4. Kebijakan Pembangunan: Antara Efisiensi, Keadilan, dan Kemandirian Daerah

Dalam arti yang lebih luas, menurut Hugh Heclo (Silalahi : 2) mengatakan bahwa istilah kebijakan diartikan sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Dibandingkan dengan pendapat Hugh Heclo, menurut Henz *et al.* (Silalahi, 1989 : 2) merumuskan bahwa kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.

Pada bagian lain konsep kebijakan sebagaimana yang dikutip oleh Sunarko (1998 : 5) didefinisikan sebagai berikut. "*Policy is a course of action intended to accomplish some end. A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decision or actions, and such a course has to be perceived and indentified by the analysisi in quetion*" (kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan. Suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka).

Di Indonesia, pembangunan Daerah didefinisikan sebagai semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah maupun yang tidak termasuk, yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari Pemerintah (APBD dan APBN) maupun yang bersumber dari masyarakat (Kunarjo : 1992). Dalam hal ini kegiatan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat merupakan pelaksanaan asas dekonsentrasi, sedangkan

pembangunan Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Pembangunan Daerah juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah tersebut melalui berbagai cara dan pendekatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Upaya-upaya tersebut lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan. Spesifikasi dari setiap program adalah proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, ujung tombak dari manajemen pembangunan di Daerah tidak lain adalah bagaimana mengelola proyek-proyek yang dilaksanakan di Daerah agar menghasilkan suatu output dan outcome atau kinerja yang optimal dengan sumber daya yang ada. Dalam kerangka ini, maka analisis manajemen pembangunan di Daerah terkonsentrasi pada manajemen proyek pembangunan yang dilaksanakan di Daerah.

Selanjutnya, kebijakan pembagian kewenangan penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sejak lama menjadi perdebatan yang tak kunjung henti. Beberapa paka, ekonomi klasik misalnya cenderung lebih memihak kepada dominasi peran Pemerintah Pusat (Nasional) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Mereka percaya, bahwa *economies of scale* akan lebih berpeluang tercapai jika perekonomian dikendalikan oleh pemerintah nasional dengan skala yang lebih besar.

Perkembangan akhir-akhir ini, menunjukkan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta pemerintah regional dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerahnya. Dalam konteks ini, kelompok pertama lebih menekankan kepada aspek efisiensi, sementara kelompok kedua selain aspek efisiensi juga aspek distribusi menjadi pertimbangan lain. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi dengan politik, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan.. Dengan demikian, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi Daerah, tidak lagi hanya menjadi konsepsi politik, tetapi juga kajian ekonomi (Sobandi : 2004).

Pembangunan regional pada hakikatnya diadakan berdasarkan pada pemikiran bahwa region secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang secara integral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem nasional. Pembangunan yang dilakukan di region-region pada dasarnya adalah juga pembangunan nasional. Atas dasar pemikiran itu, muncul pendekatan pembangunan atas dasar sektor-sektor kegiatan tanpa memperhatikan lokasinya. Namun, dalam perkembangannya pendekatan tersebut dirasakan kurang lengkap, karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua region memiliki kondisi dan potensi yang sama, sehingga muncul permasalahan kesenjangan (*inequity*) dan inefisiensi dalam pembangunan. Masih dalam tataran konsepsi pembangunan nasional, muncul

pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi dan potensi setiap region dalam suatu nation tertentu, yaitu pendekatan pembangunan regional.

Pendekatan pembangunan regional, pada babak selanjutnya terus berkembang dan menjadi perhatian baik di kalangan praktisi maupun di kalangan akademisi. Yang semula banyak didasarkan atas pertimbangan ekonomi belaka, kemudian diintegrasikan dengan perkembangan masyarakat yang makin menuntut kualitas dan kuantitas pelayanan dari pemerintah serta tuntutan kemandirian dan partisipasi pembangunan.

Kini, masalah kebijakan pembangunan regional, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut. Kebijakan pembangunan, unit pemerintahan pada tingkat manapun yang mengimplementasikannya, secara ekonomis ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya *income* per kapita. Dan peningkatan *income* per kapita ini bisa dicapai apabila terjadi pertumbuhan dalam bidang ekonomi.

Ada dua alternatif kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang ketinggalan menurut Richardson (Sobandi : 2000). Pertama, jika efisiensi nasional merupakan tujuan utama yang harus dicapai, maka kebijakan mendorong migrasi tenaga kerja inter regional lebih baik dari pada mendorong relokasi industri. Tetapi jika pemuasan preferensi-preferensi lokasional merupakan prioritas yang lebih tinggi, maka usaha untuk mendorong perpindahan modal harus

lebih ditekankan. Kedua, metode “tenaga kerja keluar pekerjaan masuk” (*labour out jobs in*) dapat dilakukan jika yang merupakan permasalahan regional adalah ketidakseimbangan pasar tenaga kerja lokal dan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan pengangguran regional.

Sementara itu, Clark & Petters dalam Richardson, dalam Sobandi, (2000) berpendapat bahwa operasi kekuatan pasar memberikan pemecahan yang lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Menurut pendapat ini, pengaturan buatan manusia tidak luwes dalam menghilangkan perbedaan-perbedaan spasial dalam hal biaya, harga, dan pendapatan, yang sering kali timbul setiap saat sebagai akibat dari interdependensi umum dalam perekonomian ruang. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan disebar di antara sejumlah individu perusahaan, dan bukannya disentralisasikan, maka kesalahan-kesalahan peramalan akan cenderung saling meniadakan.

Richardson mengkritik pandangan ini. Menurutnya, teori keseimbangan umum yang melandasinya cenderung bersifat statik, sedangkan proses regional bersifat dinamik. Menurut Richardson, (1991) argumentasi yang mengasumsikan persaingan sempurna dan marginalisme, tidak satu pun diantaranya yang relevan dengan perekonomian ruang. Oligopoli dan monopoli adalah bentuk-bentuk pasar spasial yang lebih lazim. Sedangkan perubahan-perubahan lokasional biasanya adalah merupakan suatu lompatan besar atau sama sekali tidak ada perpindahan, dan bukannya suatu perpindahan marginal. Keputusan-keputusan lokasi mungkin juga dilandaskan pada irrasionalitas dan diambil dengan mengabaikan pengetahuan yang

relevan. Penolakan terhadap mekanisme pasar dapat juga disebabkan karena divergensi biaya dan manfaat sosial (*sosial cost and benefit*), seperti biaya-biaya kongesti sosial di pusat-pusat aglomerasi. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar menimbulkan pemborosan sumber daya, misalnya mekanisme pasar tidak mampu mewujudkan keuntungan-keuntungan potensial dari investasi dalam migrasi atau mempekerjakan pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan di daerah mereka sendiri dan yang tidak mampu pindah ke daerah-daerah lain. Akhirnya, secara politik, konsep *laissez faire* mungkin tidak dapat diterima, jika ia melanggengkan kepincangan-kepincangan regional dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada teori sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, maka model atau kerangka berpikir dapat menjelaskan konsep kunci sebagai berikut :

- Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu (teori dari Syafrizal Helmi).
- Kinerja pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang atau tanggung jawabnya masing-masing, meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang sarana dan prasarana, dan bidang keuangan daerah

Dengan demikian model berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 2.1. Proses Kinerja Pembangunan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksplorasi (*explorative descriptive*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan dan mendiskripsikan temuan data di lapangan. Data yang berhubungan dengan variabel penelitian dikumpulkan secara *cross section* dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Penelitian penjelasan juga memuat deskripsi dalam uraiannya, berguna untuk menghasilkan konstruksi atas suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Buton (*key informan*), Asisten I Setda Kabupaten Buton, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Kepala Dinas PU Kabupaten Buton, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton, Kabag Pembangunan, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Perekonomian, Direktur RSUD Kabupaten Buton. Dengan demikian jumlah informan penelitian ini adalah sebanyak 10 orang.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berupa data sekunder atau dokumentasi dari Bappeda Kabupaten Buton, selanjutnya data dokumentasi ini diperkuat dengan wawancara dari masing-masing informan

sesuai dengan fungsi tugas masing-masing. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang dampak kebijakan pemekaran terhadap peningkatan kinerja pembangunan di kabupaten Buton. Selanjutnya wawancara digunakan untuk menjangkau data yang belum dapat diakses melalui dokumentasi. Dengan demikian dokumentasi digunakan sebagai petunjuk dalam menyusun dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian tersebut, maka data dan bahan utama yang digunakan adalah data yang diperoleh di lapangan, untuk kemudian didukung dengan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan. Guna memudahkan pencarian data, selengkapnya prosedur dan langkah-langkah dalam pencarian data akan menempuh tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Menginventarisasi data sekunder dengan mengacu pada permasalahan penelitian ini.
- b. Dari data sekunder ini, sebuah draf kasar mengenai dampak kebijakan pemekaran daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Buton dapat dirumuskan secara tentatif.
- c. Atas dasar draf kasar ini, sebuah pedoman wawancara bisa dirumuskan untuk mengungkap dampak kebijakan pemekaran daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Buton.
- d. Selanjutnya analisis data dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini.

Menurut Bogdan & Biklen (1992) dalam Moleong (2005:248) analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap sesuatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain Secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Inilah yang menjadi ciri utama penelitian deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992:15-20) yang terdiri atas tiga komponen analisis, seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Bagan 2. Teknik Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992:19)

3.1

1. Reduksi Data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang terinci dan lengkap, dilakukan proses pemilihan,

pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Kegiatan dalam reduksi data ini berarti suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data atau *Display Data*.

Penyajian data atau *display data* dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya ketahanan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Buton

1. Letak Geografis dan Batas Daerah

Kabupaten Buton terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 4,960 – 6,250 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 120,000 – 123,340 Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton.

Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

2. Luas Daerah

Kabupaten Buton memiliki daerah daratan seluas $\pm 2.488,71 \text{ Km}^2$ atau 248.871 Ha dan daerah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 21.054 \text{ km}^2$, dimana pada tahun 2007 kecamatan di Kabupaten Buton telah berjumlah 21 kecamatan yaitu :

a. Kecamatan yang terdapat di Pulau Buton yaitu :

Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Batauga, Kecamatan Pasar Wajo, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Siontapina, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula.

- b. Kecamatan yang terdapat di Pulau Muna yaitu: Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Sangia Wambulu.
- c. Kecamatan yang terdapat di kepulauan yaitu : Kecamatan Batu Atas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan yang paling luas daerahnya adalah Kecamatan Pasarwajo dengan luas 356,40 Km², Lasalimu 327,29 Km² serta Kecamatan Mawasangka dengan luas 271,55 Km² atau 14,31 %, 13,14 % serta 10,89 % terhadap total luas daerah Kabupaten Buton. Sedangkan daerah yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Atas dengan luas daerah 7,18 Km² atau 0,29 % dari total luas daerah Kabupaten Buton. Untuk mencapai ibukota

Untuk lebih jelasnya daerah kecamatan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada uraian tabel 1. Data tabel 1, menjadi tinjauan kebijaksanaan penataan ruang daerah Kabupaten Buton yang menitikberatkan pada kebijaksanaan pengembangan daerah. Kebijakan Pengembangan daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kabupaten Buton telah menetapkan adanya 21 (dua puluh satu) perdaerahan dalam pembangunan yang disebut Sub Pembangunan, setelah dikurangi tiga sub daerah pembangunan (SWP) yang sudah menjadi bagian administratif Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi.

Tabel 4.1. Daerah Kecamatan di Kabupaten Buton 2008

No	Daerah Kecamatan	Daerah Pedesaan	Daerah Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km ²	%
1	Lasalimu	10	1	327.29	13.15
2	Lasalimu Selatan	13	-	88.09	3.54
3	Siontapina	9	-	181.02	7.27
4	Pasar Wajo	13	7	356.40	14.32
5	Wabula	4	-	51.58	2.07
6	Walowa	5	-	65.02	2.61
7	Sampolawa	9	3	153.66	6.17
8	Batu Atas	7	-	7.18	0.29
9	Lapandewa	6	-	45.16	1.81
10	Batauga	5	5	75.83	3.05
11	Siompu	8	-	32.50	1.31
12	Siompu Barat	6	-	10.00	0.40
13	Kadatua	6	-	23.67	0.95
14	Kapontori	14	2	113.00	4.45
15	Gu	8	2	104.00	4.18
16	Sangia Wabula	6	-	10.00	0.40
17	Lakudo	11	3	225.00	9.04
18	Mawasangka	16	2	271.55	10.91
19	Mawasangka Timur	8	-	126.23	5.07
20	Mawasangka Tengah	8	-	150.22	6.04
21	Telaga Raya	5	-	71.31	2.87

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2008

3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari *pembangunan*. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Olehnya itu informasi tentang kependudukan sangat strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk kabupaten Buton dapat lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2000-2007

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2000	118.894	122.064	240.958
2001	121.917	125.118	247.035
2002	127.242	129.264	256.506
2003	127.729	129.430	257.159
2004	132.271	133.453	265.724
2005	132.664	137.436	270.100
2006	135.227	136.430	271.657
2007	135.135	140.531	275.666

Sumber data: Buton dalam Angka Tahun 2008

Data tabel di atas, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Buton Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 240.958 jiwa laki-laki 118.894 jiwa dan perempuan 122.064 jiwa. Tiga tahun kemudian tahun 2003 diadakan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan yang disingkat P4B secara sensus. Hasil pelaksanaan P4B tercatat jumlah penduduk sebanyak 257.159 jiwa atau selama tiga tahun naik sejumlah 16.901 jiwa atau sekitar 2,25 persen pertahun. Penduduk pada tahun 2003 sebanyak 257.159 jiwa tercatat laki-laki sebanyak 127.729 jiwa dan perempuan 129.430 jiwa. Sedangkan pada tahun 2005 penduduk Kabupaten Buton mencapai 270.100 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 132.664 jiwa dan perempuan sebanyak 137.436 jiwa atau tumbuh sebesar 2,30 persen dibandingkan dengan tahun 2004 yang tumbuh sebesar 2,57 % per tahun sejak tahun 2000, dan berdasarkan pencatatan terakhir jumlah penduduk Kabupaten

Buton tahun 2007 sebanyak 275.666 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 135.135 jiwa dan perempuan 140.531 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan selama kurun waktu 2005-2007 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2005-2007

No	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Tahunan
		2005	2007	
1	Lasalimu	10.878	11.298	1,91
2	Lasalimu Selatan	14.705	15.008	1,03
3	Siontapina	14.146	14.822	2,36
4	Pasar Wajo	33.793	36.044	3,28
5	Wabula	4.873	4.964	0,94
6	Walowa	4.014	4.140	1,56
7	Sampolawa	21.600	22.479	2,01
8	Batu Atas	8.182	8.397	1,31
9	Lapandewa	8.596	8.861	1,53
10	Batauga	13.555	13.889	1,22
11	Siompu	8.708	8.913	1,17
12	Siompu Barat	7.680	7.918	1,54
13	Kadatua	9.945	9.995	0,25
14	Kapontori	12.985	13.218	1,00
15	Gu	17.530	18.443	2,57
16	Sangia Wabula	6.857	7.063	1,49
17	Lakudo	22.651	23.377	1,59
18	Mawasangka	19.677	20.181	1,27
19	Mawasangka Timur	7.224	7.392	1,16
20	Mawasangka Tengah	8.739	8.829	0,51
21	Telaga Raya	10.091	10.435	1,69

Sumber: BPS Kabupaten Buton, 2008

Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton pada kurun waktu 2005-2007 sebesar 1,72 persen pertahun. Dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Buton, kecamatan Pasarwajo merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terbesar yaitu 3,28 persen pertahun., disusul kecamatan Gu

sebesar 2,57 persen, kemudian kecamatan Siontapina sebesar 2,36 persen, sedangkan kecamatan dengan Pemerintahan pertumbuhan penduduk terendah adalah kecamatan Kadatua yang hanya tumbuh sebesar 0,25 persen pertahun.

4. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di kabupaten Buton terus bertambah setiap tahun, tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Untuk lebih jelasnya persebaran penduduk di Kabupaten Buton dapat dilihat pada uraian tabel berikut.

Tabel 4.4. Persebaran Penduduk kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2006-2007

No	Kecamatan	Penduduk 2006	Persebaran (%)	Penduduk 2007	Persebaran (%)
1	Lasalimu	9.900	3,64	11.298	4,10
2	Lasalimu Selatan	15.612	5,75	15.008	5,44
3	Siontapina	12.182	4,48	14.822	5,38
4	Pasar Wajo	35.286	12,99	36.044	13,08
5	Wabula	4.900	1,80	4.964	1,80
6	Walowa	4.037	1,49	4.140	1,50
7	Sampolawa	24.153	8,89	22.479	8,15
8	Batu Atas	5.415	1,99	8.397	3,05
9	Lapandewa	8.646	3,18	8.861	3,21
10	Batauga	14.254	5,25	13.889	5,04
11	Siompu	8.783	3,23	8.913	3,23
12	Siompu Barat	7.725	2,84	7.918	2,87
13	Kadatua	10.362	3,81	9.995	3,63
14	Kapontori	13.033	4,80	13.218	4,79
15	Gu	18.600	6,85	18.443	6,69
16	Sangia Wabula	6.897	2,54	7.063	2,56
17	Laludo	23.850	8,78	23.377	8,48
18	Mawasangka	20.520	7,55	20.181	7,32
19	Mawasangka Timur	7.913	3,47	7.392	2,68
20	Mawasangka Tengah	9.439	2,91	8.829	3,20
21	Telaga Raya	10.150	3,74	10.435	3,79
	jumlah	271.657	100,00	275.666	100,00

Sumber: Buton dalam angka 2008

Data tabel 4.4 tampak bahwa dari 275.666 jiwa penduduk Kabupaten Buton sebanyak 36.044 jiwa atau 13,08 % berada di Kecamatan Pasarwajo, dengan demikian Kecamatan Pasarwajo merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan yang juga memiliki penduduk yang cukup besar adalah kecamatan Lakudo sebesar 23.377 jiwa atau 8,48 %, kecamatan Mawasangka dengan jumlah penduduk sebesar 20.181 jiwa atau 7,32 %, sedangkan kecamatan yang terkecil penduduknya adalah kecamatan Wolowa sebanyak 4.140 jiwa atau hanya 1,50 % dari total penduduk Kabupaten Buton.

Sementara itu, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas daerah maka dapat dilihat kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Batu atas yaitu sebesar 1.234. Ini berarti bahwa di kecamatan tersebut, setiap 1 Km persegi, rata-rata dihuni oleh 1.234 penduduk. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu kecamatan Lasalimu yaitu sebesar 35 jiwa per Km persegi. Sedangkan secara rata-rata keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Buton sebesar 111 per Km persegi. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2006 yaitu sebesar 109 jiwa/km².

5. Struktur Umur dan Rasio Jenis Kelamin.

Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran suatu daerah cukup tinggi maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang banyak berpenduduk usia muda. Keadaan struktur penduduk Kabupaten Buton seperti dijelaskan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	19.319	18.723	38.042
5-9	20.737	18.870	39.607
10-14	18.498	17.320	35.818
15-19	12.700	14.566	27.266
20-24	8.677	10.700	19.377
25-29	7.907	10.472	18.379
30-34	9.681	10.557	20.238
35-39	8.894	8.901	17.795
40-44	7.654	6.572	14.226
45-49	5.232	6.010	11.242
50-54	5.236	5.212	10.448
55-59	2.481	3.058	5.539
60-64	2.859	3.140	5.999
65 +	5.260	6.430	11.690
Jumlah	135.135	140.531	275.666

Sumber: Buton dalam angka 2008

Data tabel 4.5, menunjukkan bahwa pada tahun 2007, 41,16 % atau 113.467 jiwa adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton mempunyai ciri penduduk “muda” karena masih besarnya presentase penduduk dibawah 15 tahun. Pemerintahan Hal ini pula dapat kita lihat dari besarnya angka beban tanggungan yang mencapai 83,16 persen, dimana angka ini memperlihatkan perbandingan angka antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk produktif secara ekonomi (15 – 64 tahun). Tabel 5 menunjukkan bahwa hingga tahun 2007 penduduk perempuan mencapai 135.135 jiwa atau (50,98 persen), dan penduduk laki-laki mencapai 140.531 atau (49,02 persen).

Perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin tahun 2007, yaitu setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Jumlah rumah tangga pada tahun 2007 sebanyak 56.088 rumah tangga, dengan rata-rata anggota rumah tangga 5 orang tiap rumah tangga.

6. Kondisi Tanah

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit - bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 400.

7. Perairan (Laut dan Sungai)

a. Hidrologi

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang ada di beberapa Kecamatan, sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Sungai-sungai tersebut seperti sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, sungai Malaoge, Tokulo dan sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

b. Oceanografi

Kabupaten Buton dilihat dari sudut Oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054,69 Km². Daerah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata Bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini adalah Cakalang, Teri, Layang, Gembung, Udang dan jenis ikan lainnya. Disamping ikan juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan lainnya, yang semuanya ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa pulau Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah-daerah wisata bahari lainnya di Indonesia.

8. Keadaan Iklim

a. Musim

Keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada tahun 2007 ini terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara

bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim Pancaroba.

b. Curah Hujan dan Hari Hujan

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan monografi dan perputaran pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan selama tahun 2007 berkisar antara 856 mm (Talaga Raya) sampai 3.017 mm (Pasarwajo). Sedangkan hari hujan yang paling tinggi berada di Kecamatan Lasalimu yaitu 200 hari hujan, menyusul Kecamatan Pasarwajo sebanyak 197 hari hujan, Mawasangka 194 hari hujan, dan yang paling tersedikit hari hujannya adalah Kecamatan Wabula yang hanya sebanyak 95 hari hujan.

9. Potensi Sumber Daya Alam Daerah

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni; aspal dan perikanan laut. Keberadaan Aspal Buton yang telah di eksplorasi dan di eksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya Aspal dan setelah TRINIDAD. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan.

a. Bahan Galian dan Tambang

1. Aspal Alam Buton

Telah disebutkan di atas bahwa keberadaan Aspal Buton merupakan komoditas unggulan mengingat dengan meningkatnya harga Migas di pasaran dunia dan salah satu produknya adalah Aspal minyak, maka sejak tahun 2007 mulai menghentikan produksi Aspal cair secara berangsur sampai tahun 2008 tidak akan mengolahnya lagi.

Tabel 4.6. Perusahaan Pengolahan Tambang Aspal Buton

No	Nama Perusahaan	Alamat	Lokasi Tambang	Luas (Ha)	Cadangan (Ton)
1.	PT. SARANA KARYA	Banabungi JI. Wijaya 1/63 Kebayoran Baru Jakarta	Kabungka Lawele	318.526 104	38.223.120 30.000.000
2.	PT. OLAH BUMI EL CIPTA	JI. Pegangsaan II Km 3 Jakarta	Waesiu/Rongi/ Sampolawa Kabungka Lawele Lawele	97,69 1.056.42 101 1.182,34	3.516.000 - - -
3.	PT. TIMAH (Persero) Tbk	JI. Sudirman 51 Pangkal Pinang Bangka	Blok Ulala Lawele Lawele	1.928,20 1.171,36 50	- - 15.000.000
4.	PT. YUMAN JAYA TAMA	JI. Erlangga No. 101 Bau-Bau	Kabungka/ Pasarwajo	1.650,38	11.760.000
5.	PT. PUTINDO BINTECH	-	Kabungka/ Pasarwajo	142	8.520.000

Sumber : Disumben Kabupaten Buton, 2008

Oleh karena itu, maka keberadaan Aspal Buton menjadi primadona dana alternatif utama bagi pembangunan konstruksi jalan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Adapun perusahaan pengelola yang telah melakukan

eksploitasi/ penambangan Aspal di Kabupaten Buton dapat dilihat Tabel 4.6 di atas.

Sesuai data yang telah dipublikasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara (2007) dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton (2008), diketahui bahwa eksploitasi Aspal masih sangat terbatas, sejak tahun 2001 produksi hanya mencapai 200.000 ton dengan deposit mencapai 650.000.000 ton tersimpan pada hamparan seluas 70.000 ha. Kegiatan eksploitasi dan penyelidikan umum tentang potensi Aspal Buton dapat dilihat pada pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7. Data Penyelidikan Umum dan Eksploitasi Aspal Buton, 2007

No	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang/Kecamatan	Luas (Ha)	Cadangan	Ket
1	PT. Sultra Roya Tambang	Lawele/Lasalimu	2.500	-	Penyelidikan umum
2	PT. Olah Bumi El Cipta	Lawele/Lasalimu	100	-	Eksplorasi
3	PT. Putin DH Bintech	Kabungka/Pasarwajo Lawele/Lasalimu	1.500 1.814	- -	Eksplorasi Eksplorasi
4	PT. Sumitama Indah	Lawele/Lasalimu Kabungka/Pasarwajo	2.000 1.000	- -	Eksplorasi Eksplorasi
5	PT. Mega Utama Indah	Lawele/Lasalimu Kabungka/Pasarwajo	1.000 500	- -	Eksplorasi Eksplorasi
6	PT. Karma Mega Buton	Lawele/Lasalimu	3.000	-	Eksplorasi
7	PT. Metrix El Cipta	Wakaokili/Pasarwajo Lapodi/Pasarwajo Waesiu/Sampolawa	114,5 1.225 740	- - -	Eksplorasi Eksplorasi Eksplorasi
8	PT. Karunia Alam Indoneisa	Lawele/Lasalimu Kabungka/Pasarwajo Walowa/Walowa	322 1.777 1.900	- - -	Eksplorasi Eksplorasi Eksplorasi
9	PT. Asia Mineral Samudera	Kabungka/Pasarwajo Lawele/Lasalimu	1.901 1.102	- -	Eksplorasi Eksplorasi

Sumber: Distamben Kabupaten Buton 2008

Diketahui pula bahwa kadar bitumen Aspal Buton berkisar antara 15 - 30%. Berdasarkan hasil kecepatannya, maka cadangan terbesar ditemukan di lokasi Lawele 2/B seperti tertera pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Potensi Cadangan Aspal Kabupaten Buton

Nh	Lokasi	Was	Caciangan (Tuiv)	Kadar Bitumen (%)
1.	Lawele I /B	1.978,20	-	-
2.	Lawele 2/B	400,05	438.622.000	-
3.	Siontapina / B	1.986,30	-	-
4.	Winto / B	321,00	3.200.000	25-35
5.	Kabungka 1/B	1.967,67	60.000.000	15-35
6.	Kabungka 2/B	750,00	-	15-25
7.	Waisiu / B	3.600,00	1.000.000	12,5-40
Jumlah		13.003,67	680.747.000	10-40

Sumber : Distamben Kabupaten Buton, 2008

2. Mangan

Sampai pada saat ini, telah ada 2 (dua) perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Bumi Pertiwi Kencana dan PT. Titrasantana Indah Pratama seluas 5.801 ha di Desa Kumbewaha Kecamatan Siontapina dengan rincian seperti Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9. Eksplorasi Sumberdaya Mangan di Kabupaten Buton

Nh	Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Luas (Ha)	Cadangan	Keterangan
1.	PT. BUMI PERTIWI KENDANA	Kumbewaha/ Siontapina	3.804		Dalam proses eksplorasi
2.	PT. TIRTA SANTANA INDAH PRATAMA	Kumbewaha/ Siontapina	1.997		Dalam proses eksplorasi
Jumlah			5.801		

Sumber : Distamen Kabupaten Buton, 2008

Mangan yang ada di Kabupaten Buton berupa tipe Psilomelane (Ba. $H_2O_2 Mn_3 H_{10}$).

3. Pasir Besi

Endapan pasir besi di Kabupaten Buton terhampar luas di delta sungai dan pantai di Kecamatan Batauga dan sekitarnya. Sampai saat ini belum ada kegiatan eksplorasi. Diperkirakan memiliki hamparan hingga ratusan hektar.

4. Batu Gamping dan Marmer

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dan sebagian telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi Marmer, banyak dijumpai pada Formasi Wapulaka, Formasi Sampolawa, Formasi Tondo, Formasi Tobelo dan Formasi Rumu, dan seluruh Pulau Muna.

Khusus tentang Marmer dapat dijumpai pada Formasi Ogena, sedangkan asosiasi fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan KALSIT sebagai bahan batuan-batuan, kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping.

5. Intan dan Logam Mulia

Peluang keterdapatan Intan sebagaimana yang terdapat di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan kemungkinan terdapat pula di Pegunungan Lambusango yang memanjang sampai Lakologou dari Formasi Kompleks Ultrabasa - Ultramafik Kapontori sebagai batuan induknya dan tersingkap pula di bagian Barat dari Labuantae. Sedangkan peluang terdapatnya

cebakan logam mulia secara hipotesis ada di sekitar Wonco dan Lakologou dengan indikasi *Intrust Diorit* yang berumur *Eosen* sebagai batuan induknya (Primer).

6. Cekungan Minyak dan Gas Bumi

Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan migas yang ada di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di eksplorasi oleh pihak Pertamina bekerja sama dengan *Shuth East Asia Hil* dan *Gas Company* sejak tahun 1969. Kemudian Oleh *Gult Hil Company* pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran migas di 3 (tiga) titik yaitu: Bale - 15, Bulu - 15, dan Sampolakosa - 15.

Berdasarkan Buton Boundary dapat diketahui bahwa sumur Bulu - 15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak Pertamina bahwa cekungan migas yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran migas saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. Demikian maka potensi migas yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa depan menyusul kemajuan teknologi di bidang migas.

7. Potensi Panas Bumi (*Geothermal*)

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap

kritis yang sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten H yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten H ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan dari energi *Geothermal* atau panas bumi.

Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (*geothermal*) yaitu, Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Bau-Bau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Bau-Bau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Bau-Bau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan panas bumi sebagai berikut :

1. Berada pada pinggir kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir panas bumi.
2. Sumber air menghasilkan bau belerang (SO₂, I-12S).
3. Temperatur 40 - 75 °C.
4. Mengeluarkan uap air

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan energi listrik untuk:

1. Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan Aspal, industri pengolahan Aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh investor yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW.
2. Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ±15 MW, Kabupaten Muna ± 7 MW.

3. Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektar pertanian lapangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan basil pertanian dan perikanan tersebut.

Total potensi panas bumi di kabupaten Buton (Sampolawa = 5 MW, Kabungka = 10 MW, Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW).

8. Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu :

1. Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit = $0,35 \text{ m}^3/\text{detik}$, kapasitas = 10.500,00 KW.
2. Sungai Winto - Winning dengan debit = $12,30 \text{ m}^3/\text{detik}$, kapasitas = 1.600,00 KW.
3. Sungai Tondo Kabungka dengan debit $4,68 \text{ m}^3/\text{detik}$, kapasitas = 367,00 KW.
4. Sungai Sampolawa dengan debit = $5,40 \text{ m}^3/\text{detik}$, kapasitas = 480,00 KW.
5. Sungai Lakaritsu dengan debit = $0,27 \text{ m}^3/\text{detik}$, kapasitas = 17,00 KW.
6. Sungai Langkoyal dengan debit = $0,28 \text{ m}^3/\text{detik}$, kapasitas = 13.050,00 KW.

9. Potensi Perikanan Laut (Tangkap)

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Buton dapat dibedakan menjadi :

1. Potensi sumber daya ikan, yang terdiri dari
 - a. Jenis Pelagis Besar, adalah jenis ikan seperti Cakalang, Tuna dan sejenisnya yang hidup di perairan lepas pantai, mengadakan migrasi jauh dengan kecepatan 27 km/jam - 75 km/jam dan hidup pada kedalaman 40 - 100 meter, jenis pelagis besar tersebut antara lain
 - (i) Yellowfin Tuna (*Thunnus albacares*)
 - (ii) Mata Besar (*Thunnus hbesus*)
 - (iii) Albacora (*Thunnus alalungh*)
 - (iv) Sirip Biru (*Thunnus m~chyii*)
 - (v) Abu-Abu, Lhngtail Tuna (*Thunnus tongghl*)
 - (vi) Cakalang (*Katsuwlmus pelamis*)
 - (vii) Tongkol (*Euthynnus affinis*)
 - (viii) Lisong (*Auxis rhchei*)
 - b. Jenis Pelagis Kecil, adalah jenis ikan yang berada disekitar permukaan laut atau dibagian bawah/dekat permukaan maupun di lapisan tengah laut, berenang, bergerombol dan sendiri-sendiri. Jenis pelagic kecil ini, antara lain ;
 - (i) Ikan Layang (*Decapterus russelli*)
 - (ii) Ikan Kembung (*Rastrelliger kanhgurta*)
 - (iii) Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*)
 - (iv) Ikan Lisong (*Auxis rhchei*)

- c. Jenis Demersial, adalah jenis ikan yang berada di sekitar dasar, yaitu di dekat/atas permukaan dasar atau membenamkan dirinya di dalam lapisan dasar laut. Ikan ini dapat dikelompokkan menjadi :
- (i) Komersil Utama : Kerapu (*Serranidae*), Bawal Putih (*Pampus spp*), Kakap (*Lates calcarifer*), Manyung (*Arridae*), Bambarigan (*Lutjhnidhe*), Jenaha (*Lutjhnus jhni*), Kuwe (*Caranghides spp*), dan Nomei (*Harpodonidae*).
 - (ii) Komersil Kedua : Gerot-gerot (*Pommadasys spp*), Bawal hitam (*Fornio niger*), Kurisi (*Nemopteridae*), Gulamah (*Sciannidhe*), Lencam (*Letorinus spp*), Layer (*Trichiurus spp*), Kurh (*Polynemus sp.*, *Eleutherhema sp*), Ketang-ketang (*Drepanidae*), Barhnaang (*Siganus spp*), Pari (*Dasyhtis annhtates*) dan Cucut (*Corscoorhinus omblyroyncoos*).
 - (iii) Komersil Ketiga: Petek (*Leiognathidae*), Belesh (*Syndantidae*), Kurniran (*Mullidae*), Mata Besar (*Priandanthrus spp*), Kerang-kerang (*Therapan spp*), Gabes laut (*Pachycentron spp*), dan Besot (*Silago spp*).
- d. Jenis Udang, antara lain Udang Jerbung (*Banana shrimp*), Udang Putih (*Pennaeus merguinsis*), Udang Windu (*Tiger shrimp*), *Black Tiger Shrimp* (*Pennaeus monodon*) dan kelompok *krustacea*.

2. Potensi ekosistem laut, yang meliputi :

- a. Ekosistem Terumbu Karang, yang luasnya mencapai sebesar 21.833 ha.
- b. Ekosistem Padang Lamun (*Sehgrass*).
- c. Ekosistem Laut Bebas.

Tabel 4.10. Produksi Perikanan Laut dan Darat Per Ton Tiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2007

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Budi Daya Perikanan		Jumlah
			Tambak	Rumput Laut	
1	Lasalimu	1.872,64	-	694,20	2.566,84
2.	Lasalimu Selatan	3.809,96	-	1.726,50	5.536,46
3.	Siontapina				
4.	Pasarwajo				
5.	Wabula	11.948,20	-	-	11.948,20
6.	Wolowa				
7.	Sampolawa	13.580,16	-	120,40	13.700,56
8.	Lapandewa				
9.	Batu Atas	6.189,12	-	-	6.189,12
10.	Batauga	308,08	-	3.968,10	4.276,18
11.	Siompu	7.957,84	-	135,40	8.10324
12.	Siompu Barat				
13.	Kadatua	8.338,40	-	84,78	8.423,18
14.	Kapontori	10.558,96	-	410,60	10.969,56
15.	Gu	2.038,16	-	556,10	2.594,26
16.	Sangia Wambulu				
17.	Lakudo	8.645,04	-	444,20	9.089,24
18.	Mawasangka	10.776,32	-	4.012,20	4848,52
19.	Mawasangka Tengah				
20.	Mawasangka Timur	1.694,96	-	1.570,50	3.265,46
21.	Talaga Raya	2.114,44	-	1.288,90	3.403,34
Jumlah		89.842,28	-	15.071,88	104.914,16

Sumber data: Buton dalam angka 2008

Pada tahun 2007 produk perikanan di Kabupaten Buton mencapai sebesar 104.914,88 ton yang terdiri dari :

1. Perikanan laut hasil tangkapan 89.842,28 ton
2. Perikanan budi daya laut 7.078,30 ton
3. Rumpun laut 15.071.88 ton,

Produksi terbanyak berasal dari Kecamatan Mawasangka (14.848,52 ton), Kecamatan Sampolawa (13.700,56 ton), Kecamatan Pasarwajo (11.948,20 ton), Kecamatan Kapontori (10.969,56 ton) dan sedikit produksinya di Kecamatan Lasalimu (2.566,84 ton), Kecamatan Gu (2.594,26 ton), Kecamatan Mawasangka Timur (3.265,46 ton) dan Kecamatan Talaga Raya (3.403,34 ton).

Secara rinci produksi hasil perikanan di Kabupaten Buton disajikan pada Tabel 10, namun ada 7 (tujuh) kecamatan hasil pemekarannya belum dapat disajikan datanya, karena masih menyatu dengan Kecamatan induknya masing-masing.

10. Sumber Daya Hutan

Hutan di Kabupaten Buton dikelompokkan kedalam hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan lindung, hutan wisata/PPA dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Adapun luas kawasan hutan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11. Jika dibandingkan dengan seluruh luas daerah Kabupaten Buton (248.871 ha), maka luas kawasan hutan menempati posisi 59,87%, sehingga ditinjau dari luas kawasannya maka nisbah luas hutan terhadap luas daerah keseluruhan masih sangat baik, karena melebihi 49% dari, luas hutan yang dipersyaratkan menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan.

Tabel 4.11. Luas Hutan Kabupaten Buton Menurut Fungsinya Pada Tahun 2007

No	Fungsi Hutan	Luas Kawasan Hutan	
		(Ha)	(M)
1	Hutan Produksi/Tetap (HP)	55.458	37,22
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	25.100	16,84
3	Hutan Produksi (Yang Dapat dikonversi) / HPK	14.039	9,42
4	Hutan Lindung (HL)	26.675	17,90
5	Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW)	27.745	18,62
Jumlah		149.017	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Buton 2008

Kemudian ditinjau dari produksinya pada tahun 2007, produksi kehutanan di Kabupaten Buton, meliputi :

Kayu jati	: 312.630,00 m ³
Kayu Campuran	: 935,24 m ³
Rotan	: 508.284,00 m ³

10. Tatanan Budaya

Struktur budaya masyarakat Buton dalam kronologis sejarahnya dibangun melalui pengelompokan berdasarkan keberadaannya di masyarakat yang tersusun secara teratur di masa Sulthan Buton VI Dayanu Ikhsanuddin seperti berikut :

1. Kelompok Masyarakat Kaomu (terdiri dari Kamboru-mboru Talupalena), yang akan dipilih menjadi Sulthan Buton secara demokratis dan bukan dalam bentuk dinasti.
2. Kelompok Masyarakat Walaka (terdiri dari Menteri Besar, menteri Siolimbona dan Menteri Dalam) yang berfungsi menjalankan roda

Pemerintahan, yang dipilih berdasarkan kecakapan, kemampuan, integritas, dan dapat dipercaya oleh Sulthan.

3. Kelompok Masyarakat Papara (terdiri dari rakyat biasa yang mendiami seluruh daerah Kesultanan Buton).

Dalam perjalanan sejarah ke tiga pengelompokan struktur budaya masyarakat tersebut tidak lagi saling terdikhotomi satu sama lain, bahkan terlarut dalam sistem budaya nasional, di mana akulturasi budaya telah terjadi diseluruh aspek dan lingkup kehidupan manusia.

Satu hal yang menarik sesuai dengan latar belakang masyarakatnya yang datang dari berbagai suku di Nusantara dan mendiami bagian pinggir pulau-pulau yang ada di dalam daerah Kesultanan Buton, maka masyarakat Kabupaten Buton memiliki ragam budaya yang sangat heterogen, bahkan dengan jumlah bahasa yang sangat banyak (rata-rata) serta aksen dan dialek yang berbeda, hanya dipersatukan oleh bahasa Kesultanan (Pogau Wolio). Pola kehidupan masyarakat Kabupaten Buton mencakup:

1. Ahli di bidang keagamaan (Buton dikenal sebagai negerinya para Wali Allah).
2. Ahli di bidang pemerintahan (Kesultanan terdemokrat).
3. Ahli di bidang kelautan (pelayar ulung dan penguasa bahari).
4. Ahli di bidang pertanian lahan kering.

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui, masyarakat Buton berada diseluruh daerah Nusantara, bahkan saat ini diketahui raja-raja dan Kesultanan Melayu dan Brunei Darussalam adalah keturunan dan raja-raja di Kesultanan Darul Fiy Butuni.

11. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan erat kaitannya dalam rangka membentuk generasi muda yang memiliki kualitas dan kemampuan yang handal sehingga menjadi tumpuan harapan daerah dan dapat diandalkan. Sedangkan pembangunan kegiatan olahraga akan membentuk irisan generasi muda yang sehat dan kuat serta bebas dari pengaruh narkoba sebagaimana fungsinya sebagai generasi penerus penerima tongkat estafet pembangunan.

Pemuda merupakan bagian dari penduduk yang berusia mulai dari umur 15 sampai dengan umur 35 tahun. Hasil Susenas 2005, dari total 270.100 jiwa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buton, maka diperkirakan sekitar 31,09% diantaranya adalah kaum pemuda yang terdiri dari 14,32% laki-laki dan 16,77% perempuan. Kemudian dari total 83.979 jiwa jumlah kaum pemuda terdapat 46,07% laki-laki dan 53,93% perempuan. Presentase pemuda tertinggi sebesar 12,92% yang terdiri 4.992 jiwa laki-laki dan 5.854 jiwa perempuan berada di Kecamatan Pasarwajo. Sedangkan presentase pemuda terendah sebesar 1,48% yang terdiri dari 577 jiwa laki-laki dan 663 jiwa perempuan terdapat di Kecamatan Wolowa.

Berdasarkan fakta tersebut, maka komposisi jumlah pemuda di kabupaten Buton yang mencapai hampir setengahnya dari jumlah penduduk merupakan aset yang sangat besar bagi pembangunan daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Disisi lain akan menjadi kendala pembangunan daerah jika tidak diantisipasi sedini mungkin akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diinginkan, diantaranya banyaknya pemuda yang tidak sekolah maupun putus sekolah, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, tingginya tingkat pengangguran, terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat aditif HIV/AIDS dan lain-lain.

Demikian diharapkan pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pemuda sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan budaya olah raga dan prestasi guna meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Buton.

B. Kinerja Pembangunan Kabupaten Buton Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

1. Indikator Bidang Ekonomi

a. Pemerataan Pendapatan

Indikator kinerja pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama dalam hal ini adalah tingkat pemerataan pendapatan sebagai representasi dari keadilan ekonomi. Selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2007 (pasca pemekaran). Sebagai ukuran tingkat pemerataan yang digunakan adalah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton maupun pendapatan per kapita. Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006-2007

No	Lapangan Usaha	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	
		2001 (%)	2006 (%)	2007 (%)
1	Pertanian	96,41	4,06	5,66
2	Pertambangan	147,80	30,95	19,31
3	Industri Pengolahan	145,64	2,77	5,71
4	Listrik, Gas dan Air Minum	118,80	0,93	37,34
5	Konstruksi/Bangunan	103,22	3,37	4,21
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	105,61	14,56	4,93
7	Angkutan dan Komunikasi	111,75	5,28	1,90
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	108,60	9,52	12,28
9	Jasa-Jasa	105,29	4,17	5,52

Sumber Data: BPS Buton Dalam Angka, 2008

Data Tabel 4.12 di atas, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton sebelum pemekaran jika dilihat secara singkat tampak lebih tinggi, karena potensi ekonomi di atas belum terbagi per kabupaten seperti pasca pemekaran.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kabupaten Buton pasca pemekaran menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000, Tahun 2006-2007 terus mengalami kemajuan. Beberapa sektor/lapangan usaha mengalami peningkatan seperti pertanian sebesar 4,06% tahun 2006 mengalami pertumbuhan 5,66 % pada tahun 2007, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 9,22% pada tahun 2006 menjadi 12,28% pada tahun 2007. Demikian pula lapangan usaha lainnya terus mengalami pertumbuhan yang cukup positif seperti listrik, gas dan air minum, dan konstruksi/bangunan serta jasa, walaupun ada lapangan usaha yang mengalami kelambanan pertumbuhan seperti hotel dan restoran yakni 14,56% pada tahun 2006 menjadi 4,93 % pada tahun 2007.

Indikator pemerataan pendapatan lebih khusus lagi dapat dilihat dari pendapatan domestik masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada di dalam daerah (Kabupaten Buton) dalam satu tahun. Dengan demikian maka PDRB menjadi salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. PDRB Kabupaten Buton pasca pemekaran dengan Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi, di mana diketahui melalui data tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13. Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Konstan 2000, Sebelum Pemekaran Tahun 2002 dan Sesudah Pemekaran Tahun 2006-2007

No	Perincian	Sebelum Pemekaran		Sesudah Pemekaran	
		1998 (%)	1999 (%)	2006 (%)	2007 (%)
1	PDRB pada harga pasar (Juta Rp.)	482.625.80	505.609.45	669.878,39	711.077,42
2	Penyusutan (Juta Rp.)	32.381.01	27.641.50	66.776,36	70.883,25
3	PDRB pada harga pasar (Juta Rp.)	450.244.79	477.967.94	603.102,03	640.194,17
4	Pajak tak langsung netto (Juta Rp.)	3.325.12	3.473.50	8.427,87	8.946,20
5	PDRB atas dasar biaya /pendapatan Regional (Juta Rp.)	446.919.67	474.494.65	594.674,16	631.247,96
6	Penduduk Pertengahan tahun (Jiwa)	433.950.00	440.305.00	271.973	275.666
7	PDRB Perkapita	1.112.169.15	1.148.329.57	2.463.032,6	2.579.489,02

Sumber Data: BPS Buton Dalam Angka, 2008

Data Tabel 4.13 di atas, tampak bahwa pendapatan regional per kapita kabupaten Buton sebelum pemekaran daerah lebih rendah dibandingkan dengan setelah pemekaran daerah. Walaupun demikian, PDRB pada harga pasar konstan 2000 terus mengalami peningkatan dari tahun 1998 hingga tahun 1999.

Demikian pula PDRB pasca pemekaran mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2006-2007. Hal ini dapat dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 2006 sebesar Rp. 2.463.032,69 meningkat pada tahun 2007 menjadi Rp. 2.579.489,02. Demikian pula pendapatan lainnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran dapat memacu percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Buton, bahwa pendekatan pengelolaan Tata Ruang di kabupaten Buton senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan masyarakat. Di mana setiap kebijakan pembangunan diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik di bidang sektor

sarana dan prasarana maupun sektor jasa lainnya. Dengan demikian sektor ril dapat berjalan dengan baik guna mempercepat terwujudnya kemakmuran masyarakat. (Wawancara, 13 Juli 2009).

Data tabel dan wawancara di atas, tampak bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten Buton didukung oleh kebijakan pembangunan yang pro dengan rakyat. Pembangunan dititikberatkan pada berbagai sektor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga sektor ril dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi sebagai dampak kebijakan pemekaran daerah. Di mana tujuan pemekaran adalah di samping memperpendek jarak layanan masyarakat juga untuk memacu percepatan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat tidak terjadi baik antara desa, kecamatan maupun dengan perkotaan.

b. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan indikator lain untuk melihat kinerja pembangunan. Meskipun tingkat pengangguran juga terkait dengan dimensi sosial, sehingga sering kali juga dijadikan sebagai indikator sektor sosial, namun dalam hal ini lebih dilihat dari dimensi ekonomi. Pengangguran merupakan dampak ketidakterseediaan lapangan kerja, dan sempitnya lapangan kerja merupakan dampak dari rendahnya investasi.

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Untuk lebih jelasnya data statistik angkatan kerja

di Kabupaten Buton sebelum dan sesudah pemekaran daerah Kabupaten Buton dapat dijelaskan melalui uraian tabel 4.14 dan 4.15 berikut:

Tabel 4.14. Banyaknya Pencari Kerja di kabupaten Buton sebelum Pemekaran Daerah Kabupaten Buton tahun 2000

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	3
2	Sekolah Dasar	31
3	SLTP/Sederajat	256
4	SLTA/Sederajat	6.979
5	D1 + D2	196
6	Sarjana Muda/D3	250
7	Sarjana/S1	2.419
	Jumlah	10.136

Sumber Data: BPS Kabupaten Buton Dalam Angka, 2001

Data Tabel 4.14 di atas, menunjukkan bahwa banyaknya pencari kerja di Kabupaten Buton sebelum pemekaran daerah adalah 10.136 orang. Dari jumlah tersebut pencari kerja jenjang pendidikan SLTA menempati urutan tertinggi yaitu 6.979 orang dan selanjutnya diikuti oleh pada jenjang Sarjana sebanyak 2.419 orang.

Perkembangan jumlah pengangguran setelah pemekaran daerah dapat dilihat melalui uraian tabel berikut.

Tabel 4.15. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2007

No	Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Angkatan kerja	69.996	47.353	117.349
	1. Bekerja	67.510	45.188	112.698
	2. Pengangguran	2.486	2.165	4.651
2	Bukan Angkatan Kerja	15.270	45.525	60.795
	1. Sekolah	8.713	8.418	17.131
	2. Mengurus Rumah Tangga	1.926	33.838	35.764
	3. Lainnya	4.631	3.269	7.900
	Jumlah	85.266	92.878	178.144

Sumber data: Buton Dalam Angka 2008

Data Tabel 4.15 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buton sebesar 117.349 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 69.996 jiwa dan perempuan 47.353 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut sebesar 112.698 jiwa 96,04 % telah bekerja yang terdiri atas laki-laki sebanyak 67.510 jiwa dan perempuan sebanyak 45.188 jiwa. Jumlah penganggur terbuka di Kabupaten Buton mencapai 4.651 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 2.486 jiwa atau 53,45 % dan perempuan sebanyak 2.165 jiwa atau 46,55 %. Selain angkatan kerja pada Tabel 15 juga diinformasikan jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja. Dari tabel tersebut, tercatat bahwa pada tahun 2007 jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 60.795 jiwa atau 30,13 % dari total penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut yang masih bersekolah sebanyak 17.131 (28,18 %), mengurus rumah tangga sebanyak 35.764 jiwa (58,83 %), dan kegiatan lainnya sebanyak 7.900 jiwa (12,99 %).

Tabel 4.16. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	44.560	28.312	72.872
2	Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, Air dan bangunan/Konstruksi	6.240	5.609	11.849
3	Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan	16.710	11.267	27.977
Jumlah		67.510	45.188	112.698

Sumber data: Buton Dalam Angka 2008

Data Tabel 4.16 di atas, nampak bahwa berdasarkan lapangan pekerjaan, dari 112.698 jiwa penduduk yang bekerja, sekitar 64,66 % dari mereka bekerja di sektor



pertanian atau sebesar 72.872 jiwa, sektor pertambangan, industri, listrik, air dan bangunan/konstruksi sebesar 10,51 persen atau 11.849 jiwa dan sisanya yang bekerja disektor perdagangan,angkutan,keuangan,jasa perusahaan dan perorangan mencapai 24,82 % atau sebesar 27.977 jiwa.

Pendapat senada juga dijelaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton bahwa banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan pada tahun 2007 sebanyak 9.179 orang, di mana 8.616 orang merupakan sisa tahun sebelumnya dan yang terdaftar pada tahun 2007 sebanyak 2.598 orang. Tamatan SLTA merupakan pencari kerja terbanyak yaitu sebesar 4.221 orang atau 45,99 % dari total pencari kerja yang ada, sedangkan pendidikan Sarjana sebanyak 3.205 orang atau 34,92 %. Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2007 di daerah Kabupaten Buton sebesar 598 orang, dihapus sebesar 3.001 orang, sedangkan yang belum ditempatkan masih sebanyak 7.615 orang. Dari 9.179 orang pencari kerja di Kabupaten Buton, hanya tersedia 191 lowongan kerja, yakni 75 lowongan pekerjaan di sektor pertambangan dan penggalan, 69 di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dan 35 lowongan di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan (Wawancara, 13 Juni 2009).

Dikaitkan dengan kebijakan pemekaran daerah, tampak secara kasar bahwa Kabupaten Buton lebih mampu menahan perubahan kesempatan kerja dari gejolak fluktuasi ekonomi selama periode pasca pemekaran. Hal ini sesuai dengan karakteristik sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Buton.



2. Indikator Bidang Sosial

a. Keadaan Pendidikan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

Pendidikan merupakan alat dan proses pembentukan watak bangsa di segala bidang kehidupan, khususnya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan. Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar. Relevansi pendidikan yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan agar pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Buton, selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pendidikan di Kabupaten Buton dapat dilihat dari data perkembangan pendidikan, baik sebelum maupun sesudah pemekaran daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.17 dan 4.18 berikut.

Tabel 4.17. Banyaknya Sekolah, guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1999-2001 (Sebelum Pemekaran Daerah)

Tingkat Pendidikan	Tahun	Sekolah	Guru	Murid	Rata-Rata		
					Guru/Sekolah	Murid/Sekolah	Murid/Guru
TK	1999	24	63	1320	1	25	10
	2000	30	77	1402	2	34	13
	2001	35	86	1606	3	44	16
SD	1999	176	1298	31874	4	167	20
	2000	201	1321	34678	5	170	22
	2001	219	1430	43101	7	196	30
SLTP	1999	14	456	8675	13	245	13
	2000	20	497	9768	16	268	17
	2001	29	585	10722	20	370	18
SLTA	1999	4	123	2135	12	213	9
	2000	7	145	2342	16	253	12
	2001	9	175	2655	19	295	15

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, 2009

Data Tabel 4.17 tampak bahwa sebelum pemekaran daerah jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Buton telah tersebar, baik itu TK, SD, SLTP maupun SLTA. Namun demikian dilihat dari rasio perbandingan antara guru dan siswa masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rasio perbandingan antara guru dan siswa. Keadaan ini tidak stabil karena, baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran kondisi guru semakin tidak merata. Sehingga ditemukan data sebelum pemekaran ada data perbandingan yang rendah dibandingkan setelah pemekaran daerah. Padahal idealnya perbandingan itu semakin kecil atau semakin baik, karena

guru dituntut untuk membina siswa lebih terfokus pada beberapa orang saja. Hal ini dapat diuraikan juga pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18. Banyaknya Sekolah, guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005-2007 (Setelah Pemekaran Daerah)

Tingkat Pendidikan	Tahun	Sekolah	Guru	Murid	Rata-Rata		
					Guru/Sekolah	Murid/Sekolah	Murid/Guru
TK	2007	152	462	6.049	3	40	13
	2006	139	453	6.148	3	44	14
	2005	108	287	3.810	3	35	13
SD	2007	260	1.819	49.361	7	190	27
	2006	252	1.770	45.565	7	181	26
	2005	246	1.949	44.871	8	182	23
SLTP	2007	46	805	13.159	18	286	16
	2006	42	879	12.490	21	297	14
	2005	35	881	11.784	25	337	13
SLTA	2007	29	419	7.004	14	242	17
	2006	28	513	6.534	18	233	13
	2005	17	274	4.944	16	291	18

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, 2008

Tabel 4.18 di atas, menguraikan data mengenai banyaknya sekolah, guru dan murid dari semua jenjang pendidikan mulai dari pra sekolah/Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SLTA yang disajikan tiga tahun berturut-turut dari tahun 2005 hingga 2007. Dari tabel ini dapat dilihat perkembangan jumlah sekolah, guru dan murid setiap tahunnya. Jumlah sekolah TK pada periode 2005 - 2007 menunjukkan adanya peningkatan, di mana pada tahun 2005, jumlah sekolah sebanyak 108 unit meningkat menjadi sebanyak 139 unit sekolah pada tahun 2006 dan tahun 2007

menjadi 152 unit sekolah. Begitu juga dengan jumlah guru TK sejak tahun 2005 hingga 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, jumlah guru TK sebanyak 287 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 453 orang dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 462 orang. Jumlah murid TK juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah murid TK pada tahun 2004 adalah 3.810 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 6.148 orang dan pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan menjadi 6.049 orang murid. Pada tahun 2007 rasio antara guru terhadap sekolah memiliki rata-rata 3 orang. Ini berarti bahwa secara rata-rata setiap satu sekolah TK memiliki guru sebanyak 3 orang. Sedangkan rasio jumlah murid terhadap sekolah rata-rata 40 orang. Ini berarti bahwa secara rata-rata setiap satu sekolah TK memiliki murid sebanyak 40 orang. Rasio jumlah murid terhadap guru pada tahun 2007 sebanyak 13 orang, yang berarti bahwa secara rata-rata setiap satu orang guru harus menangani 13 orang murid TK.

Jumlah Sekolah Dasar pada periode 2005 - 2007 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2005 terdapat 246 unit, tahun 2006 menjadi 252 unit, sedangkan dari tahun 2007 meningkat lagi menjadi 260 unit. Walaupun demikian, jumlah guru Sekolah Dasar dari tahun 2005 - 2007 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2005 sebanyak 1.949 orang, menurun menjadi 1.770 pada tahun 2006, namun pada tahun 2007 mengalami peningkatan dan mencapai 1.819 orang. Sedangkan jumlah murid selalu mengalami peningkatan dari tahun 2005-2007, di mana pada tahun 2005 mencapai 44.871 orang, meningkat menjadi 45.565 orang pada tahun 2006, dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 49.361 orang. Rasio

guru terhadap sekolah pada tahun 2007 rata-rata 7 orang. Angka ini sama jika dibandingkan pada tahun 2006 di mana rasio murid terhadap sekolah adalah 190 yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 181 orang. Rasio murid terhadap guru tahun 2007 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu sebanyak 26 orang menjadi 27 orang.

Untuk jenjang pendidikan SLTP, jumlah sekolah, dan murid dari tahun 2005 hingga 2007 selalu meningkat, sedangkan jumlah guru pada periode yang sama mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah SLTP adalah 35 unit, pada tahun 2006 meningkat menjadi 42 unit, selanjutnya pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 46 unit sekolah. Sedangkan untuk jumlah guru pada tahun 2005 adalah 881 orang dan pada tahun 2006 menurun menjadi sebanyak 879 orang, dan pada tahun 2007 menurun kembali menjadi sebanyak 805 orang. Tidak demikian halnya dengan jumlah murid pada periode yang sama selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2005 jumlah murid SLTP sebanyak 11.784 orang, pada tahun 2006 meningkat menjadi 12.491 orang, dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 13.159 orang. Rasio guru terhadap sekolah dari tahun 2005 hingga tahun 2007 mengalami penurunan yaitu rata-rata sebanyak 25 orang pada tahun 2005, 21 orang pada tahun 2006 dan turun lagi menjadi 18 orang pada tahun 2007. Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2007 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu dari rata-rata sebesar 297 orang pada tahun 2006 menjadi 286 orang pada tahun 2007. Sedangkan rasio murid terhadap guru pada tahun 2007 adalah rata-rata

sebesar 16 orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya sebanyak 14 orang.

Mengenai jenjang SLTA tercatat bahwa jumlah sekolah pada tahun 2005 hingga tahun 2007 selalu meningkat. Pada tahun 2005 jumlah sekolah sebanyak 17 unit, pada tahun 2006 meningkat menjadi 28 unit sekolah dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 29 unit sekolah. Untuk jumlah guru dari tahun 2005 hingga tahun 2007 tidak selalu meningkat. Jumlah guru SLTA pada tahun 2005 sebanyak 274 orang dan pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 513 orang dan pada tahun 2007 menurun menjadi 419 orang. Jumlah murid SLTA pada tahun 2005 sebanyak 4.944 siswa dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 6.534 orang, sedangkan di tahun 2007 meningkat lagi hingga menjadi sebanyak 7.004 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun 2007 sebanyak 14 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang rata-rata hanya sebanyak 18 orang. Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2007 rata-rata sebanyak 242 orang dan rasio murid terhadap guru rata-rata sebanyak 17 orang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton bahwa untuk melihat kinerja pembangunan pada sektor pendidikan antara lain dapat digunakan ratio guru terhadap murid. Makin tinggi ratio guru terhadap murid berarti makin tinggi peluang penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas, karena guru merupakan faktor utama yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak. Asumsi ini didasari pemikiran bahwa jika rata-rata murid yang ditangani oleh setiap guru sedikit atau dengan kata lain ratio guru terhadap murid besar, maka proses belajar

mengajar akan makin baik dan daya serap materi oleh guru atau daya serap materi oleh murid akan tinggi (Wawancara, 13 Juli 2009).

Berdasarkan data empirik di atas, tampak bahwa ratio guru terhadap murid setelah ditetapkannya pemekaran daerah mengalami fluktuasi, namun secara umum terjadi penurunan. Ini artinya bahwa, *pertama*, distribusi guru dan murid di Kabupaten Buton sebelum dilakukan pemekaran relatif tidak merata antara daerah yang menjadi Kabupaten Buton dan daerah yang menjadi Kota Bau-Bau. Daerah yang menjadi Kabupaten Buton saat ini, yang sebagian besar pedesaan memiliki rasio guru terhadap murid lebih kecil dibandingkan Kabupaten Buton, sehingga begitu dimekarkan, kesenjangan antara Kabupaten dan Kota Bau-Bau dalam rasio guru terhadap murid terjadi. *Kedua*, meskipun kewenangan bidang pendidikan telah diberikan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, namun dalam hal pengangkatan dan pendistribusian guru, dilihat dari indikator ini, dan dikaitkan juga dengan sebagian kewenangan penempatan guru berada pada pemerintah daerah, maka kebijakan pemekaran daerah hanya menimbulkan kesenjangan dalam layanan pendidikan terhadap masyarakat. Masyarakat di Kota Bau-Bau makin mempunyai peluang yang lebih besar sedangkan masyarakat di Kabupaten Buton makin mempunyai peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan layanan pendidikan

b. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Olehnya itu pembangunan kesehatan di Kabupaten Buton ditujukan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dan yang tak kalah pentingnya bertujuan untuk membentuk anak yang sehat melalui upaya peningkatan status gizi balita. Demikian pula pelaksanaan program Nasional Keluarga Berencana (KB) Nasional diarahkan untuk menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka selama tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Buton telah giat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB secara menyeluruh di setiap kecamatan sampai ke desa-desa. Indikator pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan baik sebelum maupun sesudah pemekaran daerah seperti dijelaskan pada Tabel 4.19 dan 4.20 berikut

Tabel 4.19. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Buton Tahun 2001

Tahun	Rumah Sakit Umum	Puskesmas Non Perawatan	Puskesmas Perawatan Umum	Puskesmas Perawatan Bersalin	Pustu	Posyandu	Puskesmas Keliling		Jumlah
							Roda Empat	Pesawat Boat	
2001	0	17	4	5	71	333	10	2	442

Sumber data: Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2001

Data tabel 4.19 di atas, tampak bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten Buton pada tahun 2001 berjumlah 442 buah. Fasilitas kesehatan ini tersebar di seluruh daerah kabupaten Buton sebelum pemekaran daerah yang meliputi daerah Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton dewasa ini.

Setelah pemekaran daerah fasilitas kesehatan menurut jenisnya di kabupaten

Buton dapat dijelaskan melalui data Tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2007 di Kabupaten Buton

Tahun	Rumah Sakit Umum	Puskesmas Non Perawatan	Puskesmas Perawatan Umum	Puskesmas Perawatan Bersalin	Pustu	Posyandu	Puskesmas Keliling		Jumlah
							Roda Empat	Pesawat Boat	
2007	1	12	5	8	72	380	30	4	512
2006	1	11	5	9	72	343	18	4	463
2005	1	8	4	8	68	330	18	-	438

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, 2009

Pada tabel 4.20 terlihat bahwa tahun 2007 di Kabupaten Buton terdapat 1 Rumah Sakit Umum, Puskesmas non perawatan 12 unit, Puskesmas Perawatan Umum 5 unit, Puskesmas Perawatan Persalinan 8 unit, Puskesmas Pembantu (Pustu) 72 unit, Posyandu 380 unit dan Puskesmas keliling yang memakai roda empat sebanyak 30 unit, serta puskesmas keliling berupa Pesawat Boat sebanyak 4 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 tidak semua fasilitas kesehatan mengalami penambahan, untuk puskesmas non perawatan dari 11 unit menjadi 12 unit, puskesmas perawatan sama dengan tahun lalu 5 unit, puskesmas perawatan persalinan turun dari 9 unit menjadi 8 unit, pustu tetap 72 unit, posyandu naik dari 343 unit menjadi 380 unit, puskesmas keliling roda empat dari 18 unit pada tahun 2006 menjadi 30 unit pada tahun 2007 sedangkan puskesmas keliling yang menggunakan motor masih sama dengan tahun lalu yaitu 4 unit.

Fasilitas kesehatan seperti diuraikan di atas, dikelola atau dioperasikan oleh beberapa tenaga kesehatan, guna memberikan pelayanan masyarakat. Perkembangan tenaga kesehatan di kabupaten Buton dapat dilihat melalui uraian Tabel 4.21 dan 4.22 berikut.

Tabel 4.21. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Buton Tahun 2000 (sebelum pemekaran)

Tahun	Dokter Umum	Dokter Gigi	Spesialis	Bidan	Apoteker	SKM	Paramedis		Paramedis Pembantu	Tenaga Non Kesehatan Lainnya	Jumlah
							Perawatan	Non Perawatan			
2001	10	1	-	43	-	3	181	75	-	-	313

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2002

Data Tabel 4.21 di atas, tampak bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Buton sebelum pemekaran daerah adalah 313 orang. Tenaga kesehatan ini terdiri dari 10 orang Dokter Umum dan terbanyak keperawatan sebanyak 181 orang. Sedangkan tenaga apoteker dan spesialis belum ada.

Selanjutnya perkembangan pembangunan kesehatan pasca pemekaran daerah dapat dilihat pada uraian Tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Buton Tahun 2007

Tahun	Dokter Umum	Dokter Gigi	SKM	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Paramedis		Paramedis Pembantu	Tenaga Non Kesehatan Lainnya
							Perawat an	Non Perawatan		
2007	10	1	16	103	197	77	174	137	10	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, 2009

Data Tabel 4.22 di atas, tampak bahwa di Kabupaten Buton terdapat 10 orang Dokter Umum yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Batauga, Kapontori dan Sangia Wambulu, 1 orang Dokter Gigi yang bertugas di Kecamatan Batauga, 16 orang SKM, 103 bidan, 197 perawat dan 77 tenaga kesehatan lainnya, paramedis perawatan sebanyak 174 orang dan paramedis non perawatan sebanyak 137 orang, 10 orang Pembantu Paramedis, serta tenaga non kesehatan lainnya sebanyak 20 orang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton bahwa dalam sektor kesehatan, kinerja pembangunan dapat dilihat dari keberhasilannya menciptakan kondisi masyarakat yang sehat. Indikator tersebut merupakan *outcomes* dari berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan, sehingga dalam jangka pendek indikator tersebut kurang dapat diukur. Untuk itu, indikator antara berbagai program dan kegiatan sektor kesehatan antara lain dapat dilihat dari ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan ketersediaan layanan bagi masyarakat ini akan sangat tergantung kepada pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak lain dari tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Makin banyak tenaga kesehatan, makin tinggi peluang masyarakat untuk mendapatkan layanan yang berkualitas sehingga makin tinggi kesempatan bagi masyarakat untuk hidup sehat. Atas dasar hal tersebut, rasio jumlah penduduk terhadap dokter dijadikan sebagai indikator kinerja pembangunan pada sektor kesehatan ini. Ratio penduduk terhadap dokter menunjukkan berapa rata-rata penduduk yang harus dilayani oleh setiap orang dokter. Dengan demikian, makin sedikit rasio penduduk terhadap

dokter, makin tinggi peluang masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Sebaliknya ratio dokter terhadap penduduk menunjukkan berapa peluang seorang penduduk untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh dokter. Makin tinggi ratio dokter terhadap penduduk, makin tinggi peluang seseorang untuk mendapatkan layanan kesehatan dari dokter (Wawancara, 13 Juni 2009).

Data empirik Tahun 2005, 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa secara umum ratio dokter terhadap penduduk di Kabupaten Buton masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sangat terbatas, atau dengan kata lain telah terjadi peningkatan beban seorang dokter dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja yang tidak baik dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Untuk mengetahui perkembangan jumlah peserta PUS dan realisasi akseptor aktif sebelum dan sesudah pemekaran daerah Kabupaten Buton dapat dilihat pada uraian Tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.23. Banyaknya PUS dan Realisasi Akseptor Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan Tahun 2000

Pus	Jenis Kontrasepsi				
	Spiral IUD	PIL	Kondom	Suntikan	Lainnya
9166	23	2.510	25	1.487	701

Sumber: BPS Kabupaten Buton dalam Angka 2002

Data tabel 4.23 di atas, tampak bahwa banyak pasangan usia subur dan realisasi akseptor aktif adalah 4045 pasang. Adapun jenis kontrasepsi yang digunakan yang terbanyak adalah PIL sebanyak 2510 orang dan terendah adalah kondom 40 pasang. Selanjutnya pembangunan kesehatan di bidang Keluarga Berencana pasca pemekaran dapat dilihat pada uraian Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4.24. Banyaknya PUS dan Realisasi Akseptor Aktif dan Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan Tahun 2008

Tahun	PUS	Jenis Kontrasepsi						
		IUD	PIL	Kondom	Suntikan	Implant	MOP	MOW
2007	14.267	463	11.134	2.016	14.267	1.636	4	185
2006	13.867	483	10.779	1.164	13.867	1.660	4	189
2005	15.421	503	11.498	1.296	1.751	1.731	32	173

Sumber: Badan KB, Kependudukan dan Capil Kabupaten Buton, 2009

Data Tabel 4.24 di atas, tercatat banyaknya pasangan usia subur di Kabupaten Buton sebanyak 42.282 orang dan yang menggunakan kontrasepsi berupa IUD sebanyak 463 orang, dengan Pil 11.134 orang, Kondom 2.016 orang, suntikan 14.267 orang, implant 1.636 orang, MOP 4 orang dan MOW 185 orang.. Pada tahun 2006 PUS yang menggunakan alat kontrasepsi adalah sebesar 29.700 orang atau 70,24 % dari keseluruhan PUS di Kabupaten Buton. Pada kurun waktu 2005 – 2007 angka ini mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2005 mencapai 73,98 % dan pada tahun 2006 menurun menjadi 66,57 %. Dari berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan tampaknya suntikan merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh PUS yaitu sebanyak 14.267 orang atau 48,04 %, menyusul pil sebanyak 11.134 orang atau 37,49 persen.

Menurut Kepala Badan KB, Kependudukan dan Capil Kabupaten Buton bahwa banyaknya peserta KB aktif dan baru menurut alat kontrasepsi yang digunakan pada periode 2005 – 2007 banyaknya peserta KB aktif mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah peserta KB aktif sebanyak 30.654 orang, menurun menjadi 28.146 pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 naik mencapai 29.700 orang, tidak demikian dengan jumlah akseptor baru pada tahun 2007 sebanyak 7.603 orang, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 4.863. Dari target 7.603 orang akseptor baru pada tahun 2007, hanya terealisasi 7.603 orang atau 100,00 % (wawancara, 13 Juni 2009).

3. Indikator Bidang Sarana dan Prasarana

a. Rasio Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik Terhadap Seluruh Rumah Tangga

Dalam bidang sarana dan prasarana dasar, kinerja pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator penting. Indikator penting yang biasa digunakan dalam berbagai kajian kinerja pembangunan antara lain adalah ketersediaan jaringan listrik bagi masyarakat. Listrik dijadikan indikator penting dalam hal ini karena realita menunjukkan bahwa listrik memegang peranan penting dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi.

Tabel 4.25. Perusahaan, Langganan, Daya Terpasang, Produksi Listrik, Tenaga Listrik Terjual serta Nilai Listrik Terjual Tahun 2000-2007 (Sebelum dan Sesudah Pemekaran)

No	Uraian	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	
		Thn 2000	Thn 2006	Thn 2007
1.	Cabang/Ranting Perusahaan	6	13	13
2	Pelanggan	5.864	17.178	18.681
3	Daya Terpasang (VA)	8.671	13.645,890	15.205,930
4	Produksi Listrik (KWH)	8.910.718	9,037,126	10.740,802
5	Tenaga Listrik Terjual	7.910.718	10.252,127	12,207,464
6	Nilai Penjualan (Rp)	4.770.236	6,859,923,783	8,182,963,149

Sumber: PT. PLN (Persero)Wil. Sulsel, Sultra & Sulbar Cabang Bau-Bau, 2009

Data tabel 4.25 di atas, menunjukkan bahwa sebelum pemekaran daerah jumlah ranting perusahaan sebanyak 6 dengan pelanggan 5.864 orang dengan nilai penjualan Rp. 4.770.236. setelah pemekaran jumlah pelanggan PLN pada tahun 2007 sebanyak 18.681 pelanggan, daya terpasang 15.205.930 VA, produksi listrik 10.740.802 KWH, tenaga listrik terjual sebanyak 12.207.464 KWH dengan nilai penjualan sebanyak Rp.8.182.963.149. Peningkatan ini karena semakin meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat.

Menurut Kepala PT. PLN (Persero)Wil. Sulsel, Sultra & Sulbar Cabang Bau-Bau bahwa pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan listrik diupayakan hingga ke pelosok pedesaan. Dewasa ini, sebahagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Buton dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sementara sebahagian lagi masih disuplai oleh perusahaan Non PLN. Sampai dengan tahun 2007, belum semua daerah di Kabupaten Buton telah tersambung dalam jaringan PLN. Oleh karena itu, sebahagian masyarakat mengusahakannya secara swasembada

yaitu melalui perusahaan non PLN yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Jumlah pelanggan PLN yang terbesar adalah rumah tangga yaitu sebesar 17.949 pelanggan atau sebesar 96,08 persen dari total jumlah pelanggan PLN. Disusul oleh pelanggan dari sektor sosial sebanyak 362 pelanggan atau 1,94 persen, dari sektor bisnis sebanyak 272 pelanggan atau 1,46 persen, jawatan pemerintah 77 pelanggan atau 0,41 persen, penerangan jalan sebanyak 16 pelanggan atau 0,09 persen, dan yang paling terkecil dari sektor industri sebanyak 5 pelanggan 0,03 persen. Seiring dengan besarnya pelanggan rumah tangga maka pemakaian listrik oleh rumah tangga merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan pelanggan dari sektor lain yaitu sebesar 9.462.298 KWH atau 77,51 persen dengan nilai sebesar Rp. 6.174.078.630, menyusul bisnis sebesar 795.505 KWH dengan nilai Rp.581.685.040, sektor industri 769.946 KWH dengan nilai Rp.552.585.920, penerangan jalan sebesar 524.041 KWH dengan nilai Rp.332.766.035, sosial 259.021 KWH dengan nilai Rp.163.438.925, kemudian lainnya 233.831 KWH dengan nilai Rp.228.562.844 dan jawatan pemerintah sebesar 162.822 KWH dengan nilai Rp.149.845.695. Sampai dengan tahun 2007 jumlah perusahaan listrik di Kabupaten Buton ada sebanyak 13 perusahaan yang merupakan perusahaan cabang/ranting (Wawancara, 13 Juni 2009).

Berdasarkan data pada tabel dan wawancara di atas, tampak bahwa kebijakan pemekaran daerah telah meningkatkan konsentrasi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan listrik masuk desa. Artinya, program pembangunan listrik masuk desa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak sebelum dilakukannya

pemekaran daerah lebih terkonsentrasi di desa-desa yang ada di daerah Kabupaten Buton.

b. Panjang Jalan

Panjang jalan merupakan indikator lain untuk mengukur kinerja pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana. Jalan merupakan fasilitas pendukung utama guna membantu kelancaran roda perekonomian. Hal ini disebabkan pembangunan jalan terutama bagi daerah-daerah terpencil dapat membuka akses keterisolasian desa-desa tertinggal. Sehingga jalan raya dapat mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat. Perkembangan pembangunan infrastruktur jalan raya sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran di kabupaten Buton dapat di lihat pada uraian Tabel 4.26 berikut.

Tabel 4.26. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan Tahun 2000 (sebelum) dan Tahun 2006-2007 (Km) (Pasca Pemekaran)

Uraian	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	
	2000	2006	2007
1. Jenis Permukaan	597,10	867,52	867,52
a. Diaspal	338,30	744,27	744,27
b. Kerikil	22,40	66,46	66,46
c. Tanah	23,40	32,21	32,21
d. Tidak terinci	-	24,68	24,68
2. Kondisi Jalan	597,10	867,52	867,52
a. Baik	181,90	259,57	259,57
b. Sedang	206,90	115,00	115,00
c. Rusak	171,90	236,46	236,46
d. Rusak berat	236,40	217,49	217,49
e. Tidak terinci	-	-	-
3. Kelas Jalan	997,10	867,52	867,52
a. Kelas I	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-
c. Kelas III	-	224,28	224,28
d. Kelas III A	338,30	643,34	643,34
e. Kelas III B	422,40	-	-
f. Kelas III C.	236,40	-	-

Sumber: Dinas PUS Kabupaten Buton, Tahun 2002 dan 2008

Indikator ini dianggap penting karena panjang jalan berhubungan dengan kemudahan akses masyarakat terhadap aktivitas khususnya perekonomian, dan makin mempertinggi hubungan atau keterkaitan antar daerah, sehingga mobilisasi penduduk meningkat dan tarap hidup masyarakat pun makin meningkat. Pembangunan jalan yang dilakukan di daerah Kabupaten Buton tidak terlepas dari aspek keserasian antara beban, kepadatan lalu lintas kendaraan dan daya dukung jalan. Dengan tersedianya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Selama periode 2005 sampai dengan 2007 panjang jalan di Kabupaten Buton mengalami peningkatan, meskipun telah dilakukan kebijakan pemekaran daerah sebagaimana terlihat pada tabel 22 di atas.

Data tabel 4.26, jika dilihat menurut jenis permukaan jalan sebelum pemekaran daerah tahun 2000 untuk jalan yang diaspal 338,30%, kondisi jalan baik 181,90%. Kondisi ini sangat terbatas karena fokus pembangunan masih meliputi seluruh daerah yang belum dimekarkan.

Selanjutnya pembangunan jalan terus mengalami kemajuan setelah pascapemekaran, di mana tahun 2007 untuk jalan yang diaspal tercatat sepanjang 744,27 km (85,75 %) dan sisanya 123,25 km (14,21 %) adalah jalan yang tidak diaspal. Dari total panjang jalan yang tidak diaspal, 66,46 km adalah jalan kerikil, 32,21 km jalan tanah dan 24,68 km tidak dirinci. Apabila ditinjau dari kondisi jalan tahun 2007, dari total panjang jalan yang ada, menunjukkan bahwa sepanjang 259,57 km (29,92%) dalam kondisi baik, 115,00 km (13,26%) dalam kondisi sedang,

236,46 km (27,26 %) dalam kondisi rusak dan sisanya sepanjang 217,49 km (25,07%) dalam kondisi rusak berat.

Data Tabel 4.26, tampak bahwa pada tahun 2007 total panjang jalan di Kabupaten Buton mencapai 867,52 km yang terdiri dari jalan negara 88,30 km (10,18 %), jalan provinsi 135,98 km (15,67 %) dan jalan kabupaten sepanjang 643,24 km (74,15 %). Panjang jalan negara, jalan provinsi dan kabupaten pada tahun 2007 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2006. Untuk jalan negara pada tahun 2007 sepanjang 88,30 km, jalan provinsi 135,98 km, serta jalan kabupaten mencapai 643,34 km.

Tabel 4.27. Panjang Jalan Menurut Pemerintah Berwewenang dan Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan Tahun 2007 (Km)

Uraian	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jumlah
1. Jenis Permukaan	88,30	135,98	643,24	867,52
a. Diaspal	88,30	125,98	529,99	744,27
b. Kerikil	-	10,00	56,46	66,46
c. Tanah	-	-	32,21	32,21
d. Tidak terinci	-	-	24,68	24,68
e. Rabat Beton	-	-	-	-
2. Kondisi Jalan	88,30	135,98	643,24	867,52
a. Baik	-	-	259,57	259,57
b. Sedang	-	-	115,00	115,00
c. Rusak	-	-	236,46	236,46
d. Rusak berat	88,30	135,98	32,21	217,49
e. Tidak terinci	-	-	-	-
3. Kelas Jalan	88,30	135,98	643,24	867,52
a. Kelas I	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-
c. Kelas III	88,30	135,98	-	224,28
d. Kelas III A	-	-	643,24	643,34
e. Kelas III B	-	-	-	-
f. Kelas III C	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kabupaten Buton, 2008

Sebagaimana nampak pada tabel 4.27 di atas, dan dikaitkan dengan kebijakan pemekaran daerah, nampak bahwa kebijakan tersebut telah meningkatkan

kinerja pembangunan dalam bidang perhubungan khususnya berupa peningkatan panjang jalan. Terjadinya peningkatan indikator ini dapat dijelaskan bahwasannya dalam kondisi sebelum dilakukannya pemekaran daerah, keterbatasan prasarana jalan terjadi di daerah pedesaan, sehingga yang menjadi sasaran pembangunan prasarana jalan waktu itu adalah daerah pedesaan. Kemudian, setelah dilakukan pemekaran daerah, pembangunan prasarana jalan menjadi lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sehingga berdampak terhadap peningkatan panjang jalan secara signifikan.

4. Indikator Bidang Keuangan Daerah: Pendapatan Asli Daerah

Satu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan pemekaran daerah adalah dampak dari kebijakan tersebut terhadap struktur keuangan daerah. Yang sering menjadi sorotan dalam hal ini adalah mengenai Pendapatan Asli Daerah, bahkan hal ini secara formal dalam peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pembentukan suatu daerah otonom baru. Seringnya indikator ini disoroti terkait dengan kebijakan pemekaran daerah, nampaknya karena indikator ini sering dianggap sebagai indikator kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunannya. Padahal, dalam realita tidak ada satu daerah pun yang pembiayaan pembangunannya didominasi oleh PAD.

Sebagian besar penerimaan daerah dalam APBD bersumber dari dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus. Sementara itu, PAD, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah porsinya relatif kecil. Adapun komponen

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa PAD merupakan salah satu komponen penerimaan daerah.

Untuk lebih jelasnya realisasi penerimaan daerah kabupaten Buton sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran dapat dilihat pada uraian tabel 4.28 dan 4.29 berikut.

Tabel 4.28. Realisasi Penerimaan Daerah Otonom TK II Buton Tahun 1997/1998

Penerimaan	1996/1997	1997/1998
A. Penerimaan Daerah	43.065.305	50.722.470
1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	424.314	48.229
2. Bagian pendapatan asli daerah	1.674.490	2.304.481
3. Bagian bagi hasil pajak/bukan pajak	2.554.513	3.030.371
4. Bagian sumbangan dan bantuan	38.391.987	44.968.388
5. Bagian penerimaan pembangunan	4.788.776	6.082.848
B. Bagian urusan Kas dan Perhitungan		
1. Iuran wajib pegawai	1.696.291	2.473.292
2. Penerimaan kembali panjar pegawai	22.000	25.000
3. Penerimaan kembali panjar kerja	100.000	125.000
4. Potongan beras	2.191.875	2.463.344
5. Potongan biaya petugas PBB	67.421	61.052
6. Penerimaan pajak penghasilan (PAH)	268.217	477.585
7. Harta kelebihan penerimaan gaji/pensiun	4.797	4.961
8. Penerimaan amal bakti KORPRI	16.458	18.760
9. Penerimaan lain-lain	419.717	433.856
Jumlah (A+B)	47.852.081	56.805.318

Sumber data: RPS Kabupaten Buton Dalam Angka, 2000

Data Tabel 4.28 di atas, tampak bahwa realisasi penerimaan Daerah Otonom TK II Buton tahun 1997/1998 adalah berjumlah Rp. 47.852.081 pada tahun 1996/1997 dan Rp. 56.805.318. Dana tersebut bersumber dari Penerimaan daerah dan bagian urusan kas dan perhitungan.

Selanjutnya setelah pemekaran proporsi PAD dalam APBD sangatlah kecil (lihat Tabel 4.29). PAD hanya merupakan bagian kecil saja dari total penerimaan yang ada dalam APBD. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buton bahwa sejak dilakukannya kebijakan pemekaran daerah, penerimaan daerah dalam APBD terus meningkat. Hal ini disebabkan pengembangan potensi daerah dan adanya keterbukaan daerah-daerah terisolir yang menghubungkannya dengan pasar (Wawancara, 14 Juni 2009).

Tabel 4.29. Pendapatan Daerah Kabupaten Buton menurut Jenisnya Tahun Anggaran 2007 (Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	8.833.798.000,00
	a. Pajak Daerah	814.120.000,00
	b. Retribusi Daerah	2.368.002.000,00
	c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.030.000.000,00
	d. lain-lain PAD	4.621.676.000,00
2	Dana Perimbangan	361.642.213.000,00
	a. Bagi hasil pajak dari provinsi	12.900.213.000,00
	b. Dana Alokasi Umum	290.634.000.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	58.108.000.000,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.223.000.000,00
	a. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	1.223.000.000,00
	b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	8.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan		379.699.011.000,00

Sumber : Buton dalam Angka 2008

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kinerja pembangunan bidang ekonomi menunjukkan perbaikan dan peningkatan sesudah pemekaran dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Buton sesudah pemekaran merupakan indikator adanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat sesudah pemekaran.
2. Kinerja pembangunan bidang sosial menunjukkan peningkatan yang lebih baik sesudah pemekaran. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, seperti semakin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di daerah ini.
3. Kinerja pembangunan bidang sarana dan prasarana menunjukkan peningkatan sesudah pemekaran daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan, listrik, dan air bersih serta prasarana publik lainnya.
4. Kinerja pembangunan bidang keuangan daerah menunjukkan peningkatan sesudah pemekaran daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan dan pendapatan asli daerah (PAD) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan pada simpulan di atas dapat dikemukakan bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Buton berdampak positif pada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana dan prasarana serta bidang keuangan daerah. Namun demikian, mengingat perkembangan keempat bidang ini tidak begitu signifikan maka peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Saran Umum (Untuk Pemerintah Pusat)

Seyogyanya untuk pemerintah pusat segera mengevaluasi semua daerah-daerah yang telah dimekarkan untuk mengetahui daerah mana saja yang berhasil melakukan kebijakan pemekaran dan daerah mana yang tidak berhasil. Dengan demikian pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan tentang perlu tidaknya pemekaran daerah di Indonesia.

Dalam menetapkan kebijakan pemekaran suatu daerah hendaknya didahului studi/penelitian bukan hanya menyangkut kelayakan daerah baru yang akan dibentuk, tetapi juga dampak yang akan ditimbulkan pada daerah induk. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan yang makin mencolok antara daerah induk dengan daerah baru. Kasus pemekaran daerah Kabupaten Buton hendaknya menjadi pelajaran, bahwa sebelum dilakukan pemekaran terdapat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Lalu setelah dilakukan pemekaran, apabila pemerintah daerah tidak berupaya untuk mengejar ketinggalan, maka kesenjangan akan makin lebar, karena mobilisasi potensi masing-masing daerah akan tersekat dengan perbedaan teritorial kedaerahan.

2. Saran Khusus (Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buton)

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton perlu segera melakukan berbagai upaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi kompensasi terhadap hilangnya potensi PAD yang ada di daerah Kota Bau-Bau. Potensi yang perlu dioptimalkan tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga peningkatan pendapatan nantinya bukan berasal dari pembebanan terhadap masyarakat umum, melainkan terhadap sektor usaha. Optimalisasi potensi tersebut dilakukan dengan cara pemerintah daerah mengorientasikan pengeluaran pembangunan kepada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan potensi daerah.

Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara mantap potensi masing-masing kawasan. Atas dasar itu, upaya pemacu pertumbuhan kawasan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi potensi intinya. Kekeliruan periode sebelumnya dengan mengkonsentrasikan pembangunan dipertanian nampaknya jangan diulang lagi, karena pengalaman membuktikan bahwa telah terjadi kesenjangan antar kawasan. Daerah perkotaan yang hanya sebagian kecil daerah Kabupaten Buton dahulu, mempunyai perkembangan yang bagus, sementara kawasan pedesaan yang merupakan sebagian besar daerah Kabupaten Buton masih relatif terbelakang. Dengan kata lain, upaya pembangunan pedesaan yang sudah mulai dirintis sejak beberapa tahun terakhir, misalnya dengan upaya pelebaran dan penambahan jalan, listrik masuk desa, dan program lainnya perlu dilanjutkan, karena

program-program tersebut ternyata yang menyelamatkan kinerja pembangunan Kabupaten Buton pasca pemekaran daerah.

Perlu juga dilakukan kajian atau penelitian secara komprehensif oleh peneliti lain mengenai evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah pemekaran daerah. Evaluasi tersebut penting karena di Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya hanya ada 4 daerah otonom sekarang ini sudah menjadi 12 daerah otonom kabupaten/kota. Dengan demikian, evaluasi ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pembangunan pasca pemekaran daerah di provinsi ini.

Kepada pejabat dan pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk segera melakukan evaluasi internal terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/kota pasca pemekaran. Evaluasi ini penting untuk mengetahui dinamika dan perubahan pelayanan publik oleh para pejabat SKPD dan stafnya sebelum dan sesudah pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad M. (2001). *Psiskologi Industri dan sosial*. Yogyakarta: Liberty.
- Asturo, Israil. (1992). *Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Bryant, Coralie & Louise G. White. (1989). *Managing Development in The Third World* (diterjemahkan oleh Rusyanto L. Simatupang, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*). Jakarta: LP3ES.
- BPS Kabupaten Buton. (1999). *Kabupaten Buton Dalam Angka*. Buton: BPS.
- BPS Kabupaten Buton. (2002). *Kabupaten Buton Dalam Angka*. Buton: BPS.
- BPS Sulawesi Tenggara. (2008). *Sulawesi Tenggara Dalam Angka*. Kendari: BPS.
- Dharma, Agus. (1992). *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali.
- Effendy, Arif Roesman, (2008). *Pemekaran Daerah Kota/Kabupaten*, [http:// www.gp-ansor. Org / opini / Memaknai – Kontroversi – Pemekaran - Daerah](http://www.gp-ansor.Org/opini/Memaknai-Kontroversi-Pemekaran-Daerah). 6 February 2009.
- Handayaniingrat, Suwarno. (1993). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, Hani. (1999). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Helmi, Syafrizal. 2010. *Dasar-Dasar Praktis Memberi Motivasi Laporan Keuangan Perusahaan*. [http .// shelmi.wordpress. com](http://shelmi.wordpress.com) (tgl akses, 26 Oktober 2010).
- Kunarjo. (1992). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Laporan Penelitian. (2003). *Pengembangan Otonomi Daerah*. Bandung: UNPAD.
- Leftwich, Richard H & Ansel M. Sharp. (1980). *Economics of Sosial Issues*. Dallas, Texas, USA : Business Publication Inc.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2001). *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.



- McKenzie, Richard B. (1980). *Economic Issues In Public Policies*. USA: McGraw-Hill.
- Miles, Mathew B. & Michel A. H. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Muljadi, Arief. (2006). *Pokok-Pokok dan Ikhtisar Manajemen Stratejik. Perencanaan dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratikno. (2007). *Governance dan Krisis Teori Organisasi* dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 2, November 2007. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Prud' Homme. (1995). *The Dangers of Decentralization*. USA: The World Bank Research Observer,
- Richardson, Harry W. (1991). *Elements of Regional Economic*. terjemahan Paul Sitohang "Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional", Jakarta: FE-UI.
- Simamora, H. (1995) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Siswanto, Bedjo. (1989). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Silalahi, Oberlin. 1989. *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Sunarko, S.D. 1998. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Papyrus.
- Sobandi, Baban. (2000). *Kebijakan Pembangunan Daerah: Antara Pertumbuhan dan Efisiensi*. Jakarta: Jurnal Wacana Kinerja.
- Sobandi, Baban. (2004). *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis Profesionalisme Birokrasi*. Bandung: Humaniora Utama Pers.
- Sofian, Effendi. (1998). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Tresch, Richard W. (2002). *A Normative Theory*. California: Academic Press.



Umar, Husein. (1999). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Utomo, Tri Widodo Wahyu. (2000). *Demokrasi dan Ukuran Daerah*. Jakarta: Media Indonesia.

World Development Report (1997) *The State in a Changing World*.

UNIVERSITAS TERBUKA



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pemekaran daerah membawa dampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah di Kabupaten Buton?
2. Bagaimana dampak pemekaran daerah terhadap peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pembangunan di Kabupaten Buton?
3. Bagaimana dampak pemekaran terhadap pengelolaan tata ruang pembangunan di Kabupaten Buton?
4. Bagaimana dampak pemekaran daerah terhadap peluang lapangan kerja di Kabupaten Buton?
5. Bagaimana dampak pemekaran terhadap kinerja pembangunan pada sektor pendidikan di Kabupaten Buton?
6. Bagaimana dampak pemekaran terhadap kinerja pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Buton?
7. Bagaimana dampak pemekaran terhadap partisipasi masyarakat dalam gerakan Keluarga Berencana di Kabupaten Buton?
8. Bagaimana dampak pemekaran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buton?